

**Hubungan Patron Klien Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 Di Desa Kampala
Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu syarat Meraih Gelar

Sarjana Ilmu Politik (S.IP) Jurusan Ilmu Politik

Pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



Disusun Oleh :

Fadli Ichsan

NIM: 30600111036

JURUSAN ILMU POLITIK

FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul, ***“Hubungan Patron Klien Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto Tahun 2015”*** benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian terbukti bahwa skripsi tersebut duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat dan dibantu orang lain secara keseluruhan dan sebahagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.



Makassar, 13 September 2017

Penyusun

(Fadli Ichsan)

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul ***"Hubungan Patron Klien Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto Tahun 2015"*** yang disusun oleh saudara Fadli Ichsan, NIM; 30600111036, mahasiswa Jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam siding munaqasyah yang dilaksanakan pada hari Senin 29 agustus 2016 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, dengan beberapa perbaikan.

Makassar, 13 September 2017

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA	(.....)
Sekretaris	: Syahrir Karim, M.Si. Ph.D.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Syarifuddin Jurdi, S.Sos., M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Ismah Tita Ruslin, S.IP, M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA	(.....)
Pembimbing II	: Syahrir Karim, M.Si. Ph.D	(.....)

Diketahui Oleh :
Dekan Fakultas Ushuluddin
Filsafat Dan Politik
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Muh Natsir, MA
Nip.1959074 198903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul, *“Hubungan Patron Klien Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto Tahun 2015”* benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian terbukti bahwa skripsi tersebut duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat dan dibantu orang lain secara keseluruhan dan sebahagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.



Makassar, 13 September 2017

Penyusun

(Fadli Ichsan)

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul *“Hubungan Patron Klien Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto Tahun 2015”* yang disusun oleh saudara Fadli Ichsan, NIM; 30600111036, mahasiswa Jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam siding munaqasyah yang dilaksanakan pada hari Senin 29 agustus 2016 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, dengan beberapa perbaikan.

Makassar, 13 September 2017

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA	(.....)
Sekretaris	: Syahrir Karim, M.Si. Ph.D.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Syarifuddin Jurdi, S.Sos., M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Ismah Tita Ruslin, S.IP, M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA	(.....)
Pembimbing II	: Syahrir Karim, M.Si. Ph.D	(.....)

Diketahui Oleh :
Dekan Fakultas Ushuluddin
Filsafat Dan Politik
UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr. H. Muh Natsir, MA
Nip.1959074 198903 1 003

Kata Pengantar



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Hubungan Patron Klien Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 Di Desa kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto” dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw, sebagai Rahmatan lil alamin di muka bumi ini. juga sebagai syuri tauladan bagi ummatnya.

Sebelum ucapan banyak terima kasih dan penghargaan penuh cinta, penulis persembahkan kepada ayahanda tercinta (alm) H. Ichsan Djamal dan ibunda tercinta Hj. Nurlina Radja. Selaku orang tua kandung, yang telah mengasuh, mendoakan, dan mendidik dengan penuh kesabaran dan pengorbanan, baik dari lairiah maupun batiniyah, terkhusus kepada ibunda tercinta terima kasih atas cinta dan sayangmu selama ini, membesarkan, merawatku seorang diri ditengah kehidupan keras saat ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian studi maupun penyusunan skripsi ini, tentunya tidak dapat penulis selesaikan tanpa ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis berkewajiban menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababari., M,Si. Selaku Rektor dan Para Wakil Rektor UIN Alauddin.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Natsir., M.Ag. Selaku Dekan dan Para Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Syarifuddin Jurdi, S.Sos. M.Si, Sebagai Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Bapak Syahrir Karim, M.Si, ph, D. Sebagai Sekertaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar.
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Natsir., M.Ag. Sebagai Pembimbing I dan Bapak Syahrir Karim, M.Si, ph, D. Sebagai Pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan serta arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar yang tidak disebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis.
6. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Adik Penulis, Fauziah Ichsan yang telah memberikan semangat serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Rekan-rekan mahasiswa, khususnya para mahasiswa jurusan Ilmu Politik (IPO 1,2,3 dan 4), 2011 UIN Alauddin Makassar terkhususnya Andi Akbar, Andi Ahmad Fatawari, Ahmad Nurhanif, Andi Indra Hardianti, Asmawarni yang senantiasa memberikan saran dan masukan kepada penulis.
9. Rekan-rekan mahasiswa KKN angkatan 50 UIN Alauddin Makassar, khususnya posko Kelurahan Lembang Gantarangkeke Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng (Muhammad Firdaus, Multazam, Yasnur, Riswan, Nurfaidah Hasan, Reski Ayu Lestari, Mutmainnah S Paseng, Muhliza, Suharni) yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
10. Saudara penulis yang meski tak sedarah dari SWL 2011, Khususnya Muh Rizal Candra Putra, Muh Redzki Murdani, Kurniawan Andris, Iwan Setiawan, Daniel Sri Wardani, Amelia Ekawati, Fatirah Wardanigsih, Ami Kursiah Bahrn yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis
11. Saudara Penulis yang meski tak sedarah dari Komunitas Pemuda Pencinta Seni Turatea (KIPASTA), Khususnya Pengurus serta seluruh warga KIPASTA, yang senantiasa memberikan cinta untuk menyemangati penulis.
12. Saudara penulis yang meski tak sedarah dari Jeneponto Yamaha Matic Club (JYMAC), Khususnya Para Pengurus serta Member JYMAC, yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca yang bersifat

membangun dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis hanya mampu mengembalikan kepada Allah SWT. Semoga mendapatkan balasan yang setimpal. Amiin.

Samata, 19 Agustus 2016

Penulis

(Fadli Ichsan)



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Tinjauan Teoritis Dan Konseptual	19
1. Teori Elite	19
2. Teori Kekuasaan	25
3. Konsep Patron Klien	29
G. Metode Penulisan	33
1. Pendekatan Penelitian	33
2. Sumber Data	33
3. Teknik Pengumpulan Data	34
4. Analisis Data	35
BAB II GAMBARAN UMUM	36
A. Kabupaten Jeneponto	36
1. Visi Misi Kab Jeneponto Dalam RPJMD Tahun 2013-2018	38
2. Sarana Pendidikan	40
3. Sarana Kesehatan	40
B. Kecamatan Arungkeke	41
1. Letak Geografis Dan Batas Wilayah	41
2. Luas Wilayah	42
3. Jumlah Penduduk	42
4. Pemerintahan	43
5. Pendidikan	44
6. Kesehatan	44

C. Desa Kampala.....	45
1. Letak Geografis Dan Luas Wilayah	45
2. Jumlah Penduduk	45
3. Pemerintahan	46
4. Pendidikan.....	46
5. Kesehatan.....	46
6. Patron Klien Di Desa Kampala	46
D. Historis Kabupaten Jeneponto	48
1. Pembentukan Kerajaan Binamu	50
2. Pemerintahan Awal Kemerdekaan	53
3. Gambaran Umum Pemilihan Kepala Desa Kampala Tahun 2015..	55
BAB III PEMBAHASAN	56
A. Hubungan Patron Klien Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 Di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto	56
1. Hubungan Jasa (Balas Jasa).....	56
2. Hubungan Politik	58
3. Hubungan Ekonomi	63
4. Hubungan Komando	65
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Patron Klien Di Desa Kampala Masih Erat	69
1. Faktor Kebutuhan Primer Yang Ingin Dipenuhi Oleh Masyarakat ...	70
2. Faktor Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Pendidikan Politik	72
3. Faktor Kurangnya Figur/Tokoh Baru Dalam Masyarakat	73
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	72

ABTRAK

NAMA : FADLI ICHSAN

NIM : 3060011036

**JUDUL : HUBUNGAN PATRON KLIEN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN 2015 DI DESA KAMPALA KECAMATAN ARUNGKEKE
KABUPATEN JENEPONTO**

Penelitian ini mengangkat tentang eratnya hubungan antara tuan tanah (patron) dan masyarakat (klien) dalam pemilihan Kepala Desa Kampala 2015.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, untuk mengetahui bagaimana hubungan patron klien dalam pemilihan kepala desa kampala 2015 serta untuk mengetahui apa yang melatar belakangani hubungan patron klien di desa kampala ini masih terjaga dan tergolong masih erat selama ini.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kampala, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara akurat mengenai hubungan patron patron klien di desa kampala ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Hubungan Patron Klien dalam pemilihan kepala desa dinilai sangat berpengaruh kuat dalam memenangkan kandidat tertentu, karena sebagian besar tanah yang ditempati warga di Desa Kampala dikuasai oleh satu pihak di sebut sebagai tuan tanah (patron). Tuan tanah berhak menentukan siapa kepala desa yang harus dimenangkan dan kemudian masyarakat (patron) yang sebagian besar tinggal diatas tanahnya harus mentaati aturan yang telah berlaku, hal inilah yang kemudian juga mempengaruhi masyarakat yang tinggal diluar tanah sang tuan tanah juga tidak bisa melawan bayak dalam pemilihan kepala desa karena menganggap hanya akan membuang biaya dan tenaga. Kemudian Faktor yang kemudian membuat hubungan patron klien ini erat selam ini karena Adanya pertukaran jasa yang sangat sistematis, dimana tuan tanah sebagai patron membiarkan masyarakat yang tinggal selama puluhan tahun ini tinggal diatas tanahnya tanpa pungutan biaya sepeserpun namun ada yang kemudian perlu di ditaati sebagai konsekuensi dari pertukaran jasa ini yakni apabila adanya suatu pesta demokrasi mulai dari pemilihan presiden sampai pada tingkat pemilihan kepala desa maka masyarakat yang menjadi klien harus taat dan ikut kepada perintah tuan tanah ini

Kata Kunci : Hubungan Patron Klien, Pemilihan Kepala Desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Patron klien adalah pertukaran hubungan antara kedua peran yang dapat dinyatakan sebagai kasus khusus dari ikatan yang melibatkan persahabatan instrumental dimana seorang individu dengan status sosio-ekonominya yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan, serta keuntungan-keuntungan bagi seseorang dengan status yang dianggapnya lebih rendah (klien). Klien kemudian membalasnya dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan termasuk jasa pribadi kepada patronnya. Sebagai pola pertukaran yang tersebar, jasa dan barang yang dipertukarkan oleh patron dan klien mencerminkan kebutuhan yang timbul dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

Istilah “patron” berasal dari ungkapan bahasa Spanyol yang secara etimologis berarti “seseorang yang memiliki kekuasaan (power), status, wewenang dan pengaruh”.¹ Sedangkan “klien” berarti “bawahan” atau orang yang diperintah dan yang disuruh. Selanjutnya, pola hubungan patron klien merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat, baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan, sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah (inferior), dan

¹ Sunyoto Usman. 2004. *Sosiologi; Sejarah, Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Center for Indonesian Research and Development (CIReD). Cetakan Pertama hal 45

patron dalam kedudukan yang lebih tinggi (superior). Atau dapat pula diartikan bahwa patron adalah orang yang berada dalam posisi untuk membantu klien kliennya.² Pola relasi seperti ini di Indonesia lazim disebut sebagai hubungan bapak-anak buah, di mana bapak mengumpulkan kekuasaan dan pengaruhnya dengan cara membangun sebuah keluarga besar atau extended family. Setelah itu, bapak harus siap menyebar luaskan tanggung jawabnya dan menjalin hubungan dengan anak buahnya tersebut secara personal, tidak ideologis dan pada dasarnya juga tidak politis.

Pada tahap selanjutnya, klien membalas dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan kepada patron. Hubungan patron-klien itu sendiri telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Pendapat yang hampir serupa juga diketengahkan oleh Palras, dimana menurutnya hubungan patron-klien adalah suatu hubungan yang tidak setara, terjalin secara perorangan antara seorang pemuka masyarakat dengan sejumlah pengikutnya.³ Lebih lanjut, Pelras mengungkapkan bahwa hubungan semacam ini terjalin berdasarkan atas pertukaran jasa, dimana ketergantungan klien kepada patronnya dibayarkan atau dibalas oleh patron dengan cara memberikan perlindungan kepada kliennya.

² James C. Scott, *Moral Ekonomi Petani*, (Jakarta: LP3S, 1983), Cetakan Kedua, hlm. 41. Juga dalam: David Jarry and Julia Jary, *Dictionary of Sociology*, (London: Harper-Collins Publishers, 1991), hlm. 458

³ Christian Pelras. 1971. *Hubungan Patron-Klien Dalam Masyarakat Bugis Makassar*. Paris: Tidak Diterbitkan

Tujuan dasar dari hubungan patron klien bagi klien yang sebenarnya adalah penyediaan jaminan sosial dasar bagi subsistensi dan keamanan. Apabila hubungan dagang/pertukaran yang menjadi dasar pola hubungan patron klien ini melemah karena tidak lagi memberikan jaminan sosial dasar bagi subsistensi dan keamanan maka klien akan mempertimbangkan hubungannya dengan patron menjadi tidak adil dan eksploitatif, yang terjadi kemudian legitimasi bukanlah berfungsi linear dari neraca pertukaran itu.

Oleh sebab itu tidak mengherankan jika ada tuntutan dari pihak klien terhadap patronnya untuk memenuhi janji-janji atau kebutuhan dasarnya sesuai dengan peran dan fungsinya. Penulis dapat menemukan hubungan seperti sifatnya akan langgeng dan permanen jika masing-masing pihak menemukan kesesuaiannya dan manfaatnya. Dalam konteks hubungan antar kelompok atau suku bangsa, hubungan patron klien ini lambat laun menjadi hubungan yang sifatnya struktural dan dominative dan diterima sebagai suatu kebenaran yang diwariskan secara turun-temurun.

Pemilihan umum (disebut Pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan.

Pemilu dianggap lambing, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan

dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam partai, lobbying, dan sebagainya.⁴

Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.

Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

Pemilihan juga dilakukan saat memilih kepala desa, atau seringkali disingkat Pilkades, adalah suatu pemilihan Kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa.

Kepala desa merupakan pemimpin dalam suatu desa, sifat pokok yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang sabar, seperti yang terdapat dalam Al Quran yang bunyinya:

⁴ Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar ilmu politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal 461

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

Terjemahannya: “Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar . Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami. (QS. As-Sajdah (32) :24)”

Kesabaran dan ketabahan dijadikan pertimbangan dalam mengangkat seorang pemimpin. Sifat ini merupakan syarat pokok yang harus ada dalam diri seorang pemimpin.

Seperti dalam Al Quran para pemimpin dijadikan sebagai seseorang yang bisa memegang amanah dan dapat di jadikan contoh dan tauladan dari orang-orang yang dipimpinnya. Para pemimpin juga harus merupakan orang yang sabar.

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ

الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AL-AQIDAH
AL-KHAQS
Terjemahan: “Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah, (QS. Al-Anbiya (21):73)”

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.⁵

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah pesta demokrasi rakyat pedesaan yang di dalamnya kebebasan memilih rakyat tetap terjamin.⁶ Dalam pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk Indonesia yang berhak dan terdaftar sebagai pemilih. Pemilihan sebagai proses pemilihan awal untuk mencapai tujuan yang diinginkan harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati..

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya dan berhasil guna dengan pemberdayaan seluruh masyarakat, Kepala Desa merupakan figure yang sangat penting dan strategis peranannya. Oleh karenanya untuk mendapatkan kepala desa harus ditempuh melalui berbagai prosedur dengan berbagai persyaratannya. Hal ini dimaksudkan agar seleksi pemilihan kepala desa dapat dilakukan sejak dini, setidaknya sejak pendaftaran untuk mendapatkan bakal calon, memilih dan menetapkan kepala desa yang berdedikasi, cakap dan mampu untuk melaksanakan semangat otonomi desa serta mengatur kegiatankegiatan kedinasan secara baik dan benar.

⁵ Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades

⁶ Ngabiyanto dkk. 2006. *Bunga Rampai Politik dan Hukum*. (Semarang:Rumah Indonesia. 2006) Hal 80

Untuk mendukung terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa, berbagai peraturan perundang undangan yang adapun seperti halnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) juga dimasukkan karena akan digunakan sebagai sarana menekan terjadinya penyimpangan sekaligus untuk menegakkan aturan hukum yang ada. Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pernerintah nasional dan berada di Daerah Kabupaten, desa merupakan suatu daerah yang sangat potensial dalam berbagai hal. Baik dalam hal sumber daya alam maupun manusia serta kewilayahannya. Adanya perangkat desa yang terdiri dari Kepala Desa dengan segenap aparat maupun adanya Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, haruslah mampu menjadi kekuatan penggerak jalannya pemerintahan di desa.⁷

Bila Kepala Desa dipilih berdasarkan Pemilihan Kepala Desa secara langsung dengan berdasarkan berbagai aturan yang ada, demikian pula dengan Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa, pada dasarnya

⁷ Bambang Budiono. *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan Di Indonesia*. (Jogjakarta: Renika, 2000)

adalah sumber kekuatan yang harus didukung bersama. kepala desa sendiri merupakan Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD yang harus dipilih melalui suatu Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan oleh suatu kepanitiaan yang dibentuk oleh BPD yang keanggotaannya terdiri dari anggota BPD dan Pamong Desa yang bertugas menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa.⁸

Pemilihan Kepala Desa selama ini tidaklah bebas dari segala bentuk campur tangan pemerintah. Pencampuran awalnya baik, yaitu hendak member aturan main bagi pelaksanaan pemilihan kepala desa agar lebih terstruktur.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, di Bagian Keempat diatur tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu mulai dari Pasal 43 s/d Pasal 54. Dalam Pasal 46 PP No. 72 tahun 2005 tersebut diatur sebagai berikut :

- a) Kepala Desa **dipilih langsung** oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- b) Pemilihan Kepala Desa bersifat **langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.**
- c) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui **tahap pencalonan dan tahap pemilihan.**

Sedangkan untuk pemilih diatur dalam Pasal 45, yang berbunyi sebagai berikut : "Penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang

⁸ Oentoeng Muarif. *Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teracuni*. (Jogjakarta: Mandala.2000). hal 41

pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.” Adapun untuk pengaturan lebih lanjut tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa akan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan.⁹

Dari beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan diatas, tidak ada satu ketentuanpun yang secara tegas memasukkan pemilihan kepala desa sebagai bagian dari pemilihan umum. Akan tetapi apabila melihat isi/materi dari beberapa ketentuan tersebut, misalnya : tata cara pemilihan kepala desa yang dipilih secara langsung, asas-asas pemilihan kepala desa, pentahapan pencalonan dan pemilihan, persyaratan pemilih dan lainnya, sama persis dengan pengaturan pemilu. Dengan demikian secara substansial pemilihan kepala desa sebenarnya juga termasuk kedalam lingkup pemilihan umum.

Pembangunan nasional di dalam pemerintahan pada dasarnya merupakan pembangunan secara keseluruhan sektor pemerintahan dari tingkat pusat hingga tingkat Kelurahan maupun Desa. Pembangunan itu sendiri dimaksudkan agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat dapat diwujudkan dengan sebaik mungkin sesuai aturan yang ada.¹⁰

⁹ Pasal 53 PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

¹⁰ Ahmad Dahlan. *Pemerintahan Baru Di Indonesia dalam Perspektif Undangundang Nomor 22 Tahun 1999*. (Jakarta: Obor Mas.2000). hal 11

Untuk memimpin dan menampung aspirasi masyarakat yang ada di desa, maka sebuah desa akan dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa yang dipilih dari masyarakat desa itu sendiri.

Dilansir dari *wikipedia*, Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Jabatan Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya wali nagari (Sumatera Barat), pambakal (Kalimantan Selatan), hukum tua (Sulawesi Utara), perbekel (Bali), kuwu (Cirebon dan Indramayu).

Kepala Desa yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan desa. Wakil pemerintah sebagaimana dimaksud adalah perangkat pemerintah kecamatan dalam rangka dekonsentrasi.

Tugas dan wewenang kepala desa sebagai wakil pemerintah kecamatan adalah:

- 1) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 2) koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di desa;

- 3) koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di desa.

Pemilihan kepala desa yang pada hakikatnya pesta demokrasi di desa yang seluruh kewenangan penuhnya di serahkan kepada rakyat untuk memilih kepala desa atau yang memimpin desa tersebut, namun ada yang menarik di salah satu desa di kabupaten Jeneponto, dimana sistem pemilihan lebih terorganisir.

Masyarakat di desa kampala menyerahkan langsung kepada salah satu elit di desa yang tidak lain merupakan tuan tanah. Ini karena sebagian besar Masyarakat yang menjadi klien, diberikan tempat tinggal diatas tanah tuan tanah (patron) dan timbal balik dari hubungan patron klien ini yakni ketika suatu pemilihan atau pesta demokrasi, mulai dari Pemilihan Presiden sampai pada tingkat pemilihan kepala desa, masyarakat (klien) yang tinggal diatas tanah tuan tanah (patron) harus ikut pada instruksi dari elite yang menjadi tuan tanah tersebut.

Berdasarkan dari uraian di atas maka penulis menganggap penting dan tertarik untuk menjadi bahan penelitian, dengan judul “Hubungan Patron Klien dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 Di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto”.

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian di atas maka permasalahan yang menjadi fokus perhatian penulis dalam penelitian yaitu “

1. Bagaimana Pola Hubungan patron klien dalam pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 Di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto?
2. Apakah Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Hubungan Patron Klien Masih Bertahan Di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan, yaitu

1. Untuk mengetahui bagaimana Hubungan patron klien dalam pemilihan kepala desa tahun 2015 di desa Kampala kecamatan Arungkeke kabupaten Jeneponto.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan Hubungan patron klien selama ini masih erat di desa Kampala kecamatan Arungkeke kabupaten Jeneponto.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagi ilmu pengetahuan

Kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang menggeluti bidang kajian ilmu politik.

2. Bagi instansi terkait dan masyarakat

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintahan Daerah atau Dinas Instansi terkait, serta Pemerintahan Desa sendiri di dalam mengevaluasi

keberhasilan serta kendala-kendala yang dihadapi untuk pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat di masa-masa mendatang.

3. Bagi Penulis

Dapat menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan penulis dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) terkait masalah yang diteliti, serta merupakan tugas akhir bagi peneliti untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Politik.

E. Kajian Pustaka

Penelitian-penelitian mengenai patron klien ataupun mengenai kepemimpinan telah dilakukan oleh beberapa peneliti di dalam maupun di luar negeri.

Mohammad Romadhan (2009) dari skripsi berjudul “Pola Hubungan Tengkulak dengan Petani (Studi Kasus Hubungan Patron Client Pada Masyarakat Petani Di Desa Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu). Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa hubungan petani dengan tengkulak berawal dari hubungan dagang antara penjual dengan pembeli. Kemudian hubungan tersebut berlanjut menjadi hubungan yang lebih intens dan mengarah kepada hubungan yang saling terkait satu sama lain dan sulit dipisahkan karena didasari oleh hubungan yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Hubungan itu tercermin/terlihat dari tindakan yang mereka lakukan baik petani maupun tengkulak dalam melakukan hubungan tersebut. Tindakan tersebut terdiri dari tindakan rasional dan tindakan non-rasional. Tindakan rasional yang

dilakukan petani adalah karena pertanian merupakan jalan hidup mereka maka mereka harus berusaha untuk mencapai tujuan bertani yang berhasil dengan beragam cara dan cara-cara ataupun akses yang lebih mudah yang akan mereka pilih salah satunya akses yang mudah dalam mendapatkan modal pinjaman melalui tengkulak. Disisi lain petani juga sering melakukan tindakan-tindakan yang non-rasional. Adapun tindakan non-rasional yang dilakukan petani adalah dalam melakukan pinjaman modal kepada tengkulak, petani tidak terlalu memperhitungkan kerugian yang mereka alami diantaranya bunga yang lebih tinggi dan keharusan menjual hasil pertaniannya kepada tengkulak meskipun dengan harga yang jauh dibawah harga standar di pasaran, bahkan tidak jarang hanya karena alasan kebiasaan yang sudah menjadi budaya turun temurun. Sedangkan tindakan rasional yang dilakukan tengkulak adalah memperoleh keuntungan semata.¹¹

Syafriyatin (2012) dari skripsi yang berjudul “Pola Hubungan antara Petani Karet dengan Toke (Patron-Klient) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar”. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani karet tidak hanya dilakukan sepihak hanya oleh petani itu sendiri akan tetapi harus ada kerjasama semua pihak untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Peran pemerintah dan lembaga penyuluhan, lembaga pemasaran karet sangat

¹¹ Romadhan, Muhammad. *Pola Hubungan Tengkulak Dengan Petan*, Skripsi,(Universita Sumat Utara,2009), hal 45-47

diperlukan dalam meningkatkan pendapatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat petani.¹²

Moh. Ikbal (2013) Hubungan Patron-Klien Antara Kepala Desa Dan Masyarakat Di Madura (studi kasus pilkades di Desa Aeng tong-tong Saronggi Sumenep). Pemilihan Kepala Desa (pilkades) merupakan pintu gerbang transisi kepemimpinan desa yang demokratis dimana pilkades konon dianggap sebagai arena demokrasi yang paling nyata di desa. Dalam pilkades terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi masyarakat, pemilihan secara langsung dengan prinsip one man one vote. Namun disadari atau tidak meski demokratisasi membuka ruang keterlibatan civil society, partisipasi publik dalam setiap pemilu maupun pilkades tersebut telah di koersi ke dalam wujud partisipasi yang sifatnya transaksional. Partisipasi publik seharusnya dibangun atas dasar orientasi normatif dalam rangka memperkuat tujuan negara bukan untuk kelompok atau individu. Setidaknya proses transisi politik demokrasi di indonesia telah merekam sejarah panjang rezim kekuasaan patrimonialisme sejak orde lama hingga reformasi. Kekuasaan patrimonialisme ini terus berlangsung dan dipertahankan dalam pola-pola tertentu yang sejatinya adalah merupakan bagian dari dinamika demokratisasi yang berkembang di indonesia. Patrimonialisme politik adalah merupakan gambaran praktek kekuasaan pemerintahan yang diselenggarakan dan

¹² Syafriyatin, *Pola Hubungan Antara Petani Karet Dengan Toke (Patron Klien)*. Skripsi, (Universitas Riau, 2012), hal 87-88

dipertahankan dengan cara bagaimana kekuasaan tersebut mampu mempertahankan kesetiaan elit politik politik yang ada.¹³

Ristia Meilani (2012) Skripsi yang membahas tentang pola hubungan patron klien antara mandor dan pemanen dalam prakteknya hubungan ini tidak hanya sebatas hubungan kerja saja tapi juga hubungan patron klien antara mandor dan pemanen meluas kedalam aktivitas sehari-hari di luar pekerjaan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terbentuknya hubungan patron klien antara mandor dan pemanen adalah ekonomi (kondisi ekonomi yang miskin dan tidak punya penghasilan lain), sikap mental (sikap pasrah akan keadaan, cepat merasa puas atas hasil yang didapat, sulit mengatur keuangan), dan faktor sosial budaya (budaya masyarakat yang butuh jaminan sosial, keterbatasan lapangan pekerjaan, dan tidak memiliki skill dan keterampilan untuk bekerja dibidang pekerjaan lain).¹⁴

Jedri dan M. Y Tiyas Tinow (2011) dalam skripsi yang berjudul (Analisis Hubungan Patron Klien Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011, dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana analisis politik Patron Klien Pemilihan Kepala Daerah. Dari analisa yang telah dilakukan terhadap hubungan patron-klien H. Sukarmis dengan tokoh etnis Jawa di daerah mayoritas masyarakat Jawa khususnya yang ada di Kecamatan Singingi,

¹³ Ikbal, Moh. *Hubungan Patron-Klien Antara Kepala Desa Dan Masyarakat Di Madura*. 2013, hal 56-57

¹⁴ Meylani, Ristia. *Hubungan Patron Klien Antara Mandor Dan Pemanen*, skripsi, (Universitas Andalas Padang, 2012), Hal 58-59

Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Benai, dan Kecamatan Logas Tanah Darat, maka dapat disimpulkan. Pertama, Proses terjadinya hubungan patron-klien yang terjadi di daerah / desa-desa mayoritas masyarakat Jawa khususnya di Kecamatan Singingi, Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Benai dan Kecamatan Logas Tanah Darat telah memenuhi ciri-ciri patron-klien, yaitu adanya pemilikan sumber daya ekonomi dan politik yang tidak seimbang, sehingga adanya hubungan saling ketergantungan, saling memberi dan menerima (asas timbal balik). Kemudian ada juga hubungan loyalitas dan hubungan yang mempribadi (*personalized relationships*). Kedua, Terjadinya struktur ketergantungan tokoh etnis Jawa dan masyarakat Jawa terhadap H. Sukarmis di daerah mayoritas masyarakat Jawa yang tersebar di Kecamatan Singingi, Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Benai dan Kecamatan Logas Tanah Darat di karenakan tingkat perkonomian dan sumber daya politik yang dimiliki masyarakat Jawa dan tokoh etnis Jawa yang rendah. H. Sukarmis yang memiliki sumber daya ekonomi dan politik yang tinggi dan menguasai sumber-sumber yang ada disekitarnya, akan selalu berusaha membantu dan menawarkan bantuan kepada tokoh dan masyarakat Jawa, baik berupa bantuan bersifat pribadi, lapangan pekerjaan dan peneintensifkan pembangunan pembangunan di daerah mayoritas masyarakat Jawa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dilakukan sampai petani oleh masyarakat Jawa dan tokoh etnis Jawa memberikan loyalitas dalam dukungan suara pada pemilihan umum kepala daerah (*pemilukada*) tahun 2011 dan menciptakan ketergantungan yang tinggi dari tokoh dan masyarakat Jawa

kepada H. Sukarmis. Ketiga, Adanya hubungan sosial atau emosional antara tokoh etnis Jawa dengan H. Sukarmis, hubungan ini tercipta karena mereka sama-sama membutuhkan dan saling memberi-menerima (asas timbal balik).¹⁵

Dari beberapa kajian pustaka diatas, sebenarnya masih ada pustaka yang belum membahas terlebih dalam tentang pola hubungan patron klien. Dimana patron klien yang dimaksud disini yakni adanya hubungan patron (tuan tanah) dengan klien (masyarakat) yang masih erat hingga saat ini, tuan tanah yang merupakan patron menyediakan tanah kepada masyarakat untuk ditempati sebagai tempat bermukim maupun bercocok tanam, hal ini telah berlangsung sangat lama hingga menjadi turun temurun. Dari hubungan ini lahir kemudian beberapa konsekuensi yang perlu di taati oleh masyarakat, salah satunya dalam kontestasi pemilihan kepala desa dimana patron menjadi pilar utama dalam memenangkan kandidat tertentu di masyarakat desa itu tersebut, oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk mengangkatnya dalam skripsi yang berjudul “Hubungangan Patron Klien Dalam Pemilihan Kepala Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto Tahun 2015”. Sehingga penulis yakin bahwa skripsi yang akan dibahas ini belum ada duplikat dengan buku atau karya ilmiah lainnya. Namun kajian pustaka diatas penulis akan menjadikan bahan perbandingan dalam penelitian.

¹⁵ Jedri dan M. Y Tiya Tinow, *Anasllisis Hubungan Patro Klien Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011*. 2011, hal 11-13.

F. Tinjauan Teoritis Dan Konseptual

1. Teori Elit

Istilah *elit* disini pertama-tama menunjukkan kepada suatu minoritas pribadi-pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial. Kaum elit adalah minoritas-minoritas yang efektif dan bertanggung jawab efektif melihat kepada pelaksanaan kegiatan kepentingan dan perhatian kepada orang lain tempat golongan elit ini memberikan tanggapannya. Golongan elit yang mempunyai arti secara sosial akhirnya bertanggung jawab untuk realisasi tujuan-tujuan sosial yang utama dan untuk kelanjutan tata sosial.¹⁶

Istilah elit sebenarnya berasal dari kata latin *eligere* yang berarti “memilih”. Pada abad ke-18, penggunaan kata itu dalam bahasa Prancis telah meluas dengan memasukkan penjelasan baru dalam bidang-bidang lainnya. Kaum elit adalah minoritas-minoritas yang efektif dan bertanggung jawab; efektif melihat kepada pelaksanaan kegiatan kepentingan dan perhatian kepada orang lain tempat golongan elit ini memberikan tanggapannya.

Salah satu tipe aktor politik yang memiliki pengaruh dalam proses politik, adalah pemimpin politik dan pemerintahan. Seperti dalam masyarakat terdapat stratifikasi dari segi kekuasaan yang dimiliki yang memiliki kekuasaan disebut *elit* (pemimpin), dan yang tidak memiliki kekuasaan, dan

¹⁶ Suzanne Keller, *Penguasa dan Kelompok Elit*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995).

arena itu mematuhi pemilik kekuasaan disebut massa rakyat. Stratifikasi kekuasaan ini dapat ditemui dalam masyarakat macam apapun.¹⁷

Laswell (1936) berpendapat bahwa elite sebenarnya bersifat pluralistik. Sosoknya tersebar (tidak berupa sosok tunggal), orangnya sendiri bisa berganti-ganti pada setiap tahapan fungsional dalam proses pembuatan keputusan, dan perannya pun bias naik-turun tergantung situasinya. Bagi Laswell, situasi itu yang lebih penting dalam situasi *egaliter*, peran elit tidak terlalu menonjol dan status elit bisa melekat kepada siapa saja yang kebetulan punya peran penting. Ini adalah persoalan empiris, bukan konseptual. Sementara itu makro analisis sejarah memperlihatkan bahwa memang ada periode di mana kedudukan elite dominan, dan ada periode di mana kedudukan elite tidak begitu jelas (dalam situasi ini, kecakapan yang diperlukan untuk menguasai keadaan sangat bervariasi, mulai dari kekerasan, propaganda, organisasi, hingga strategi tawar-menawar).

Teori elit percaya bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran pada kekuasaan sosial dan politik secara penuh.¹⁸ Elit yang berkuasa demikian dikatakan Harold Lasswell, merupakan suatu kelas yang terdiri atas mereka yang berhasil mencapai kedudukan dominasi yang dianggap bahwa elit adalah individu-individu yang menduduki posisi puncak dalam institusi-institusi ekonomi, militer dan politik. Menurutnya individu-

¹⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Widisarana Indonesia, 2001), hal 133

¹⁸ SP Varma, *Teori Politik Modern*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), hal 202

individu yang termasuk dalam kelompok elit merupakan golongan yang relatif sangat terpadu, homogen dan erat berhubungan satu dengan lainnya. Mereka menduduki posisi puncak pada suatu institusi berasal dari latar belakang sosial dan pandangan hidup yang relatif sama, karena kebanyakan mereka mempunyai latar belakang pendidikan yang sama. Demikian juga mereka sering bertemu dalam perkumpulan-perkumpulan sosial yang diselenggarakan oleh berbagai kelompok sosial yang sama. Karena kedudukan yang demikian maka elit mampu mengeluarkan keputusan-keputusan yang berlaku dan mengikat semua anggota masyarakat lainnya. Keputusan elit yang demikian ini dapat dinyatakan bersumber pada institusi-institusi dimana mereka berada diposisi puncak. Pada posisi inilah elit tersebut melaksanakan dan memaksakan keputusan tersebut untuk ditaati oleh anggota masyarakat. Namun yang menjadi persoalan adalah apakah para elit tersebut mempunyai kepentingan yang relatif sama.¹⁹

Karakter elite bisa berubah-ubah. Transformasi elite sudah sering dikupas. Pareto melihat vitalitas dan keruntuhan sebagai suatu siklus elit yang tak pernah usai. Para mahasiswa yang mempelajari modernisasi di Dunia Ketiga sering mendapati bahwa ketegangan peran elit dari generasi revolusi ke generasi teknokrasi. Para pelaksana yang memperantarai mereka dengan khalayak parateknisi, prajurit, ulama seringkali menjadi elit lapis kedua yang direkrut oleh elit penguasa untuk mendukung mereka. Sejumlah pengamat percaya bahwa elit memang acapkali lahir untuk mengemban misi

¹⁹ SP Varma, *Teori Politik Modern.*, hal 204

historis. Peran dominan yang mereka mainkan kemudian membuat mereka merasa unggul, mereka merasa lebih pintar ketimbang para ilmuwan, lebih kuat dari pada para prajurit, dan lebih berani dari pada siapa pun untuk memikul resiko sebagai pejuang revolusi atau petinggi kapitalis.

Dalam dunia modern menurut Putnam di mana elit di pandang sebagai kalangan orang-orang mapan yang punya posisi di kemiliteran, lembaga legislative lingkungan diplomatik, atau struktur kepartaian, ada semacam hirarki yang semakin berlapis-lapis. Setiap anggota elit tidaklah sama status dan pengaruhnya. Meskipun elit dipandang sebagai pengembangan bakat-bakat terbaik di berbagai bidang hukum, bisnis, akademik, dan lain-lain. Mereka bukanlah satu kelompok yang permanen. Anggota lama elit bisa terpengant, digantikan oleh elit lapis kedua yang sejak awal sudah terpilih atau hadir sendiri, menunggu peran dominan dibidangnya.

Peran petinggi elit tidak selamanya saling mendukung. Kerumitan strukturnya sangat tinggi, dan satu sama lain berjuang memelihara posisinya sendiri. Elit militer contohnya tekanan-tekanan dari eselon setingkat di bawah elit terus berlangsung, memaksakan pergantian anggota elit puncak yang harus diterima sebagai syarat kesinambungan elit itu sendiri. Homogenitas elit administrasi juga hanya ilusi, dalam bidang profesi yang relatif otonom, seperti dinas kepolisian. Korps diplomatik, dinas pemadam kebakaran, dan sebagainya, pergantian anggota elit puncak lebih teratur. Namun dalam dunia politik dan kebijakan, pergantian elit ikut dipengaruhi oleh kelompok lain yang mendukungnya.

Teori elit memandang bahwa setiap masyarakat terbagi dalam dua kategori:

- a. sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah, dan
- b. sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah.

Mosca dan Pareto membagi stratifikasi masyarakat dalam tiga kategori yaitu elit yang memerintah (governing elite), elit yang tidak memerintah (nongoverning elite) dan massa umum (non-elite).²⁰

Teori elit bersandar pada kenyataan bahwa setiap masyarakat terbagi dalam 2 kategori yang luas, yang mencakup:

- 1. Sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah;
- 2. Sejumlah massa yang ditakdirkan untuk memerintah

Asas-asas umum dalam teori elit politik:

- 1. Kekuasaan didistribusikan dengan tidak merata;
- 2. Pada hakikatnya, orang hanya dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan politik “penting” dan mereka yang tidak memilikinya;
- 3. Secara internal elit itu bersifat homogen, bersatu dan memiliki kesadaran kelompok;

²⁰ SP, Varma, *Teori Politik Modern*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal 199

4. Elit mengatur sendiri kelangsungan hidupnya (*self perpetuating*) dan keanggotaannya berasal dari satu lapisan masyarakat yang sangatterbatas (*exclusive*),
5. Karena keempat hal diatas, kelompok elit itu pada hakikatnya bersifat otonom, kebal terhadap gugatan dari siapapun di luar kelompoknya mengenai keputusan-keputusan yang dibuatnya.

Teori elit dibangun di atas pandangan atau persepsi bahwa keberadaan elit baik politik maupun elit agama tidak dapat dielakkan dari aspek-aspek kehidupan modern yang serba kompleks. Dalam sejarahnya, jumlah elit cenderung lebih sedikit akibat legitimasi dari masyarakat demikian berat.

Ada dua tradisi akademik tentang elit, dalam tradisi yang lebih tua elit diperlukan sebagai sosok khusus yang menjalankan misi histories, memenuhi kebutuhan mendesak, melahirkan bakat-bakat unggul. Elit dipandang sebagai kelompok pencipta tatanan yang kemudian dianut oleh semua pihak. Dalam pendekatan yang lebih baru, elit dipandang sebagai suatu kelompok yang menghimpun para petinggi pemerintahan. Pengertian elit dipadankan dengan pemimpin atau pembuat keputusan.²¹

Dalam masyarakat yang menganut paham demokrasi, maka keberadaan elit tidak bisa dilepaskan dari adanya proses sosial yang berkembang. Keller mengemukakan empat proses utama yang mendorong perkembangan elit yakni:

1. Pertumbuhan penduduk

²¹ Suzzane Keller, *Penguasa dan Kelompok Elit Penentu Dalam Masyarakat Modern*, Alih bahasa D. Noer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal 56

2. Pertumbuhan spesialisasi jabatan
3. Pertumbuhan organisasi formal atau birokrasi
4. Perkembangan keagamaan moral

Dengan berjalannya proses itu, kaum elit pun menjadi semakin ragam dan lebih bersifat otonom.²²

Sehingga secara umum, elit merupakan sekelompok orang yang menempati kedudukan-kedudukan tinggi dalam arti yang lebih khusus, elit juga ditunjukkan oleh sekelompok kecil yang memegang pemerintahan serta lingkungan dimana kekuasaan itu diambil. Dengan demikian, konsep tentang elit cenderung lebih menekankan kepada elit penguasa dan elit yang tidak berkuasa yang mengarah kepada adanya kepentingan yang berbeda.

2. Teori Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah-laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Kekuasaan Politik adalah “kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri”. Pada dasarnya kekuasaan politik adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang bisa menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sumber sumber tersebut bisa berupa media

²² Suzanne Keller, *Penguasa dan Kelompok Elit Penentu Dalam Masyarakat Modern*. hal 87

massa, media umum, mahasiswa, elit politik, tokoh masyarakat ataupun militer.²³ Jenis-jenis kekuasaan yang kita ketahui pada umumnya sekiranya dapat dibagi beberapa jenis kekuasaan sebagai berikut: (a) kekuasaan eksekutif, yaitu yang dikenal dengan kekuasaan pemerintahan dimana mereka secara teknis menjalankan roda pemerintahan, (b) kekuasaan legislatif, yaitu sesuatu yang berwenang membuat, dan mengesahkan perundang undangan sekaligus mengawasi roda pemerintahan, (c) kekuasaan yudikatif, yaitu sesuatu kekuasaan penyelesaian hukum, yang didukung oleh kekuasaan kepolisian, demi menjamin *law enforcement*/ pelaksanaan hukum.

Dalam kekuasaan ini, menggunakan teori kekuasaan Max Weber dan teori fungsional struktural talcoot parsons. weber mendefinisikan kekuasaan sebagai kemungkinan bagi seseorang untuk memaksakan orang-orang lain berperilaku sesuai dengan kehendaknya.²⁴

Pada dasarnya hubungan kekuasaan politik adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang bisa menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sumber-sumber tersebut bisa berupa media massa, media umum, mahasiswa, elit politik, tokoh masyarakat ataupun militer. Hubungan kekuasaan merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang menunjukkan hubungan yang tidak setara (*asymetric relationship*), hal ini disebabkan dalam kekuasaan terkandung unsur “pemimpin“ (*direction*) atau apa yang oleh Weber disebut

²³ Imam Hidayat, *Teori-Teori Politik*, (Malang: SETARA press, 2009), 31.

²⁴ Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik* (jakarta : Rieneka Cipta, 2001) hal, 190

“pengawas yang mengandung perintah“ (*imperative control*). Dalam hubungan dengan unsur inilah hubungan kekuasaan menunjukkan hubungan antara apa yang oleh Leon Daguít disebut “pemerintah” (*gouvernants*) dan “yang diperintah” (*gouvernes*).

Max Weber mengatakan, kekuasaan (*power*) adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Kekuasaan harus membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan bukan mendatangkan dominasi yang mengakibatkan ketidakadilan dan diskriminasi politik bagi masyarakat. Hak milik kebendaan dan kedudukan adalah sumber kekuasaan. Birokrasi juga merupakan salah satu sumber kekuasaan, disamping kemampuan khusus dalam bidang ilmu-ilmu pengetahuan ataupun atas dasar peraturan-peraturan hukum yang tertentu. Jadi kekuasaan terdapat dimana-mana, dalam hubungan sosial maupun didalam organisasi-organisasi sosial.²⁵

Terkait dengan kekuasaan dalam pemerintahan desa, Max Weber membagi kekuasaan dalam tiga tipe, yaitu;

a. Kekuasaan tradisional, yaitu kekuasaan yang bersumber dari tradisi masyarakat yang berbentuk kerajaan dimana status dan hak para pemimpin juga sangat ditentukan oleh adat kebiasaan. Tipe jenis ini melembaga dan diyakini memberi manfaat ketentraman pada warga.

²⁵ Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik* (jakarta : Rieneka Cipta, 2001) hal, 201

b. Kekuasaan kharismatik. Tipe yang keabsahannya berdasarkan pengakuan terhadap kualitas istimewa dan kesetiaan kepada individu tertentu serta komunitas bentukannya, tipe ini dimiliki oleh seseorang karena kharisma kepribadiannya. Kekuasaan tipe ini akan hilang atau berkurang apabila yang bersangkutan melakukan kesalahan fatal. Selain itu, juga dapat hilang apabila pandangan atau paham masyarakat berubah.

c. Kekuasaan rasional-legal, yaitu kekuasaan yang berlandaskan sistem yang berlaku. Bahwa semua peraturan ditulis dengan jelas dan diundangkan dengan tegas serta batas wewenang para pejabat atau penguasa ditentukan oleh aturan main. Kepatuhan serta kesetiaan tidak ditujukan kepada pribadi pemimpin, melainkan kepada lembaga yang bersifat impersonal. Dalam masyarakat demokratis kedudukan wewenang berupa sistem birokrasi, dan ditetapkan untuk jangka waktu terbatas (periode). Hal ini untuk mencegah peluang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya sekaligus menjamin kepentingan masyarakat atas kewenangan legal tersebut.

Kekuasaan akan mudah dipahami dengan mengambil contoh organisasi “Negara” sebagai kekuasaan tertinggi. Negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk menerapkan berbagai aturan – aturan bahkan dengan paksaan. Penerapan kekuasaan dalam negara berbeda-beda pada setiap Negara berdasarkan sistem politik yang dianut negara tersebut. Kekuasaan seorang presiden, berbeda dengan kekuasaan seorang perdana menteri pada sebuah

Negara kerajaan, dan kekuasaan seorang raja juga berbeda dengan kekuasaan seorang perdana menteri.²⁶

3. Konsep Patron Klien

Kata patron berasal dari bahasa latin *pater* yang berarti bapak, dari *pater* berubah menjadi *patris* dan *patronis* yang berarti bangsawan atau *patricius* yang berarti seseorang yang dianggap pelindung sejumlah rakyat jelata yang menjadi pengikutnya.²⁷

Sebaliknya klien atau *client* berasal dari kata *cliens* yang berarti pengikut. Mereka ini adalah orang-orang merdeka yang sejak awal atau bekas budak yang dimerdekakan. Mereka menggantungkan diri pada patron, bahkan kadang menggunakan nama paham sang patron.

Patron berasal dari bahasa latin yaitu “patronas” atau yang kita kenal dengan arti bangsawan, sedangkan klien berasal dari kata “cliens” yang berarti pengikut. Dalam bahasa Spanyol, istilah “patron” secara etimologis berarti seseorang yang memiliki kekuasaan, status, wewenang dan pengaruh besar. Sedangkan “klien” berarti bawahan atau orang yang diperintah

Untuk pemahaman lebih lanjut mengenai pemahaman patron klien, berikut ini definisi yang dikemukakan oleh Lande dan Scott. Menurut Lande, hubungan patron klien merupakan aliansi dua pribadi yang tidak sama, kekuasaan status atau sumber daya yang masing-masing menemukan suatu

²⁶ Muh. Irfan Idris & Nila Sastrawati, *sosiologi politik*. (Makassar: Alauddin Press.2012) hal 56

²⁷ Ng.Philipus, M.S Dr. Nurul Aini. *Sosiologi dan Politik* cetakan ke-4, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2011. Hal 41

hal yang berguna sebagai anggota unggul seperti aliansi yang disebut pelindung dan kliennya disebut inferior.

Menurut Scott, bahwa hubungan patron klien adalah suatu kasus hubungan antara dua orang yang sebagian besar melibatkan instrumental dimana seseorang yang lebih tinggi kedudukan sosial ekonominya (patron) menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan atau keuntungan atau kedua-duanya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya (klien), yang pada gilirannya membalas pemberian tersebut dengan memberikan dukungan umum dan bantuan, termasuk jasa-jasa pribadi kepada patron.²⁸

Cristian Pelras mengatakan hubungan patron klien merupakan hubungan tidak setara yang terjalin secara perorangan antara seorang pemuka masyarakat (*patron*) dengan sejumlah pengikutnya (*klien*). Hubungan itu berdasarkan pertukaran jasa, di mana ketergantungan klien pada patron diimbali oleh perlindungan patron pada kliennya.²⁹

James Scott mengatakan bahwa patron klien merupakan hubungan spesial antara dua pihak di mana pihak memiliki status ekonomi lebih tinggi menggunakan pengaruhnya dan *resources*nya untuk melindungi dan memberi manfaat pada pihak yang status sosial ekonominya lebih rendah. Dalam

²⁸ Heddy Shri Ahimsa. 2007. *Patron & Klien di Sulawesi selatan*. (Yogyakarta : Kepel Pres) edisi terbaru, hal 4

²⁹ Ng.Philipus, M.S. Nurul Aini. 2011. *Sosiologi dan Politik* cetakan ke-4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal 42

hubungan ini, imbalan yang diberikan klien dalam bentuk bantuan atau dukungan termasuk pelayanan kepada patron.³⁰

Perbedaan imbalan yang diberikan patron dan klien:

- a. Imbalan klien pada patron dapat diberikan oleh siapa saja.
- b. Imbalan patron hanya dapat diberikan oleh orang yang berstatus lebih tinggi.

Peter M. Blau mengatakan hubungan patron-klien lebih merupakan hubungan pertukaran (*Exchange relationship*) yaitu bahwa:

- a. Pertukaran hanya terjadi antara pelaku yang mengharapkan imbalan dari pelaku lain dalam hubungan mereka.
- b. Dalam mengejar imbalan ini, para pelaku dikonseptualisasikan sebagai seseorang yang mengejar profit.
- c. Pertukaran antara dua macam, yang langsung (dalam jaringan interaksi yang relatif kecil) dan kurang langsung (dalam sistem sosial yang lebih besar).
- d. Ada empat macam imbalan dengan derajat berbeda, yaitu uang, persetujuan sosial, penghormatan/penghargaan dan kepatuhan.³¹

Ciri-ciri hubungan patron-klien:

1. Adanya ketidakeimbangan status antara patron dan klien.

³⁰ Ng.Philipus, M.S. Nurul Aini. *Sosiologi dan Politik* cetakan ke-4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal 42

³¹ Ng.Philipus, M.S. Nurul Aini. *Sosiologi dan Politik* cetakan ke-4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal 43

2. Meskipun patron juga mengharapkan bantuan dari klien, tetapi kedudukan patron lebih tinggi dari klien.
3. Ketergantungan klien pada patron karena adanya pemberian barang-barang yang dibutuhkan klien dari patro yang menyebabkan adanya rasa utang budi klien pada patron.
4. Utang budi ini menyebabkan terjadinya hubungan ketergantungan.

Menurut Peter M. Blau sifat hubungan patron-klien adalah sebagai berikut:

- a) *Asas resiprositas*
- b) *In equal*
- c) *Ada force dan coercion*
- d) Ikatan akrab atas dasar saling percaya.

Sedangkan menurut James Scott ada tiga sifat hubungan patronklien:

- a) *Basic i equity*
- b) *Face to face character*
- c) *Diffuce flexibility* (meliputi semua segi kehidupan)

Ada tiga jenis imbalan yang dapat diberikan klien pada patron, yaitu:

1. Klien dapat menyediakan tenaganya bagi usaha patron di ladang, sawah atau usaha lainnya.
2. Klien dapat menyerahkan bahan makanan hasil ladangnya buat patron atau pelayan rumah tangga.

3. Klien dapat menjadi kepentingan politik patron, bahkan bersedia menjadi kaki tangan patron.³²

G. Metode Penulisan

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif membantu peneliti dalam melakukan penelitian dengan memanfaatkan konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui kesesuaian hubungan antara patron klien dengan pemilihan kepala desa.

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber

³² Ng.Philipus, M.S. Nurul Aini. *Sosiologi dan Politik* cetakan ke-4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal 44

data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.³³

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Observasi, adalah kegiatan keseharian manusia menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit³⁴.
- b. Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai serta memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Adapun tahapan-tahapan wawancara meliputi:
 1. Menentukan siapa yang diwawancarai
 2. Mempersiapkan wawancara
 3. Melakukan wawancara dan memelihara agar wawancara produktif
 4. Menghentikan wawancara dan memperoleh rangkuman wawancara.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, h. 137

³⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2009), Hal 115

- c. Studi Kepustakaan yaitu dengan membaca buku majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang, dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan proses pemberdayaan masyarakat.
- d. Penelusuran data online, data yang dikumpulkan melalui online seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas online sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data informasi yang berupa data maupun informasi teori, secepat atau semudah mungkin. Dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

5. Analisis Data

Di dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif yakni data yang diperoleh akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk kata-kata lisan maupun tulisan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian. Serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi literatur untuk kemudian memperjelas gambaran hasil peneli

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Kabupaten Jeneponto

Kabupaten Jeneponto adalah salah satu daerah tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Bontosunggu. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 749,79 km² dan berpenduduk pada tahun 2013 sebanyak 351.100 jiwa yang tersebar di 11 kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar dikecamatan Binamu yaitu sebanyak 53.705 jiwa. Letak Geografis Kabupaten Jeneponto terletak antara 5°23'12'' - 5°42'1,2'' Lintang Selatan dan 119°29'12'' - 119°56'44,9'' Bujur Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Takalar di sebelah utara, Kabupaten Bantaeng disebelah Timur, Kabupaten Takalar Sebelah Barat dan Laut Flores di sebelah Selatan. Kondisi tanah (topografi) pada bagian utara terdiri dari dataran tinggi dengan ketinggian 500 sampai dengan 1400 m, bagian tengah 100 sampai dengan 500 m dan pada bagian selatan 0 sampai dengan 150 m di atas permukaan laut. dan memiliki pelabuhan yang besar terletak di desa Bungeng.³⁵

³⁵ Katalog, BPS 11 02011.7304, *Jeneponto Dalam Angka*, (Badan Pusat Statistik, 2013), hal 1



Sumber Data : *Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto*

Pemerintahan Daerah Jeneponto mencakup 133 desa/kelurahan dengan rincian 82 desa dan 31 kelurahan. Ditinjau dari status desa/kelurahan yang tertinggal, masih banyak dijumpai desa/kelurahan yang tertinggal sebanyak 50 desa/kelurahan, sisanya yang lain yaitu sebanyak 63 desa/kelurahan tidak tertinggal lagi. Pada tahun 2013 tanah Negara seluas 402.70 Ha telah disertifikatkan. Sedangkan untuk pendaftaran hak pencatatan tanah di Jeneponto, menurun drastis sebanyak 261 buah. Diantaranya pengakuan hak 110, pemberian hak 71, hak pakai 3, pemisahan 58, dan sertifikat 19.³⁶

Pembangunan di bidang Pendidikan, pada tahun 2013 di Kabupaten Jeneponto jumlah taman kanak-kanak sebanyak 126 buah. Jumlah sekolah Dasar (SD) Negeri sebanyak 283 buah dengan jumlah guru sebanyak 3.215

³⁶ Katalog, BPS 11 02011.7304, *Jeneponto Dalam Angka*, (Badan Pusat Statistik, 2013), hal 12

orang dan murid sebanyak 47.819 orang. Jumlah SLTP Negeri sebanyak 60 buah dengan jumlah guru sebanyak 1.111 orang dan jumlah murid sebanyak 12.965 orang. Jumlah SLTA Negeri 12 buah dengan jumlah guru 394 orang dan murid 5.519 orang.³⁷

Keberhasilan pembangunan di bidang Kesehatan bisa dilihat dari 2 aspek kesehatan yaitu sarana kesehatan dan sumber daya manusia. Jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2013 terdiri dari 1 Rumah sakit, 18 Puskesmas dan 469 posyandu. Di samping sarana kesehatan, terdapat sumber daya manusia dibidang kesehatan yakni dokter umum sebanyak 31 orang, dokter gigi 12 orang, perawat 222 orang bidan 91 orang, dan perawat gigi sebanyak 25 orang.³⁸

1. Visi dan Misi Kabupaten Jeneponto dalam RPJMD Tahun 2013-2018

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2013-2018 Kabupaten Jeneponto memiliki Visi “Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan penguatan daya saing daerah menuju masyarakat Jeneponto yang Sejahtera”.

Makna Visi tersebut adalah :

) Dapat di maknai bahwa adanya suatu niat, tekad dan keinginan yang bulat (*good will*) yang dilandasi oleh hati nurani untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelolah pemerintahan berdasarkan asas-asas *good governance* di tandai dengan

³⁷ Katalog, BPS 11 02011.7304, *Jeneponto Dalam Angka*, (Badan Pusat Statistik, 2013), hal 56

³⁸ Katalog, BPS 11 02011.7304, *Jeneponto Dalam Angka*, (Badan Pusat Statistik, 2013), hal 75

meningkatnya pelayanan public yang efektif dan efesien, terlaksananya reformasi birokrasi daerah, meningkatnya kapasitas fiscal daerah dan meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

) Dapat dimaknai sebagai kondisi Kabupaten Jeneponto tahun 2018 yang diperhitungkan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional sebagai daerah yang memiliki daya saing daerah yang kuat melalui pengelolaan dan pengembangan potensi daerah secara inovatif, kreatif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan ditandai dengan peningkatan citra daerah dikancah regional dan nasional melalui produk-produk potensi local yang memiliki nilai komperatif (*branding komoditi*) dan peningkatan perekonomian masyarakat.

) Dapat dimaknai sebagai kondisi masyarakat Kabupaten Jeneponto tahun 2018 yang relative terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun materil secara layak dan berkeadilan sesuai perannya dalam kehidupan yang ditandai dengan meningkatnya indeks dan peringkat IPM ditingkat Provinsi Sulawesi Selatan, meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi secara progresif, menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya prestasi-prestasi masyarakat serta berhasilnya Kabupaten Jeneponto keluar sebagai daerah tertinggal.

Adapun Misi yakni :

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik melalui penyelenggaran pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)
3. Membangun kemandirian ekonomi masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya daerah yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan yang bertumpu pada potensi lokal
4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efesien, produktif, transparan, akuntabel

5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar disetiap desa/kelurahan yang merujuk pada prinsip pengembangan dan tata ruang dan lingkungan pemukiman yang berkelanjutan

6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama

2. Sarana Pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk menentukan masa depan daerah dan bangsa sehingga pembangunan dibidang pendidikan harus mendapat perhatian yang serius, karena pembangunan sumber daya manusia (SDM) suatu negara akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial, karena manusia berlaku aktif dari seluruh kegiatan tersebut.

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Jeneponto semakin lengkap dengan adanya sarana pendidikan Taman Kanak-Kanak sampai perguruan Tinggi, Baik yang dikelola oleh Dikbud, Non Dikbud maupun Swasta. Pada tahun 2015 di kabupaten Jeneponto Jumlah Sekolah Dasar (SD) sebanyak 286 buah dengan jumlah guru sebanyak 1.725 orang, murid sebanyak 45.904 Jumlah SLTP sebanyak 64 buah dengan jumlah guru sebanyak 578 orang dan murid 21.525 orang.³⁹

3. Sarana Kesehatan

Tingkat kesehatan masyarakat suatu daerah dapat dilihat dari 2 aspek yaitu aspek ketersediaan prasarana kesehatan diantaranya Rumah Sakit,

³⁹ Katalog, BPS 11 02011.7304, *Jeneponto Dalam Angka*, (Badan Pusat Statistik, 2016), hal 61

Puskesmas, Posyandu dan Apotek dan aspek sumberdaya manusianya. Jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2015 terdiri dari 1 unit Rumah Sakit yaitu RSUD Lantong Pasewang disamping itu, terdapat 18 unit puskesmas, 52 poskesdes, 55 posyandu pembantu, dan 484 posyandu.⁴⁰

B. Kecamatan Arungkeke

1. Letak geografis dan batas wilayah

Kecamatan Arungkeke merupakan salah satu dari 11 Kecamatan di Kabupaten Jeneponto yang berbatasan Kecamatan Batang di sebelah utara, Laut Flores di sebelah timur, Kecamatan Binamu disebelah barat dan Laut Flores di sebelah selatan dengan ibu kota kecamatan di desa Arungkeke.

Dari 7 desa di kecamatan Arungkeke, sebanyak 6 desa diantaranya merupakan daerah pantai dan hanya 1 desa lainnya merupakan daerah bukan pantai.⁴¹

Menurut jaraknya, maka letak masing-masing desa ke ibukota Kecamatan dan ibukota Kabupaten Sangat bervariasi. Jarak desa ke ibukota kecamatan maupun ke ibukota Kabupaten berkisar 4-14 km. Untuk jarak terjauh adalah desa Arungkeke Pallantikang yaitu sekitar 14 km dari ibukota Kabupaten (Bontosunggu), sedangkan untuk jarak terdekat adalah Desa Kalumpang Loe yaitu sekitar 4 km.

⁴⁰ Katalog, BPS 11 02011.7304, *Jeneponto Dalam Angka*, (Badan Pusat Statistik, 2016), hal 62

⁴¹ Katalog, BPS 11 02011.7304.041, *Kecamatan Arungkeke Dalam Angka* (Badan Pusat Statistik, 2016), hal xiii

2. Luas Wilayah

Kecamatan Arungkeke terdiri dari 7 desa dengan luas wilayah 29,91 km². Dari luas wilayah tersebut pada Tada table tampak 1.2 nampak bahwa Desa Boronglamu memiliki terluas yaitu 7,23 km², sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Desa Arungkeke pallantikang yaitu 2,73 km².⁴²

Tabel 1.2 Luas Wilayah Kecamatan Arungkeke

NO.	Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Persentase
1	Kampala	3,94	13,17
2	Bulo-Bulo	4,82	16,11
3	Palajau	3,72	12,43
4	Kalumpang Loe	4,38	14,64
5	Arungkeke	3,09	10,33
6	Boronglamu	7,23	14,17
7	Arungkeke Palantikang	2,73	9,12
Jumlah		29,91	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, Tahun 2016

3. Jumlah Penduduk

Kurun waktu tahun 2011-2015 jumlah penduduk Kecamatan Arungkeke meningkat, pada akhir tahun 2011 sekitar 18.680 jiwa dan terakhir pada tahun 2014 sekitar 18.796 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin bahwa jumlah penduduk laki-laki sekitar 8.979 jiwa dan perempuan sekitar 9.817 jiwa.

⁴² Katalog, BPS 11 02011.7304.041, *Kecamatan Arungkeke Dalam Angka* (Badan Pusat Statistik, 2016), hal xiii

Dengan demikian rasio jenis kelamin adalah sekitar 0,92 yang berate setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat sekitar 92 orang penduduk laki-laki.

Kepadatan penduduk Kecamatan Arungkeke pada tahun 2014 sekitar 567 jiwa per km², sedangkan tahun 2013 sekitar 625 jiwa per km². Ditinjau menurut desa/kelurahan, maka kepadatan penduduk tertinggi adalah desa Arungkeke yang merupakan ibukota kecamatan yaitu 1.426 jiwa per km², menyusul Desa Palajau sekitar 903 jiwa per km², dan Desa Arungkeke Palantikang sekitar 803 jiwa pr km². Selanjutnya Desa/kelurahan dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah di Desa Boronglamu sekitar 243 jiwa km².⁴³

4. Pemerintahan

Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Arungkeke dilaksanakan oleh sejumlah aparat/pegawai negeri yang berasal dari berbagai dinas/instansi pemerintahan yang jumlahnya 61 orang terdiri atas 48 orang laki-laki dan 13 orang perempuan. Jumlah tersebut menurun disbanding tahun sebelumnya yaitu 74 orang. Hal ini disebabkan karena adanya mutasi pegawai.

Tingkat klasifikasi Desa/kelurahan dikecamatan Arungkeke tahun 2015 terdiri dari 4 desa/kelurahan dengan klasifikasi swakarya dan 3 desa/kelurahan lainnya tergolong swasembada. Dengan demikian tidak ada desa/kelurahan yang termasuk swadaya.⁴⁴

⁴³ Katalog, BPS 11 02011.7304.041, *Kecamatan Arungkeke Dalam Angka* (Badan Pusat Statistik, 2016), hal xv

⁴⁴ Katalog, BPS 11 02011.7304.041, *Kecamatan Arungkeke Dalam Angka* (Badan Pusat Statistik, 2016), hal xiv

Seluruh desa/kelurahan dikecamatan Arungkeke tergolong desa berkembang, namun demikian masih ada desa/kelurahan yang termasuk desa tertinggal. Ini berarti program-program yang dicanankan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah belum membawa hasil positif bagi masyarakat pedesaan di Kecamatan Arungkeke.

5. Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan di kecamatan Arungkeke, pada tahun 2014/2015 jumlah TK di kecamatan Arungkeke ada 14 sekolah, memiliki 28 kelas dengan 435 orang murid dan 43 orang guru. Tingkat SD, baik SD negeri maupun SD Swasta sebanyak 14 sekolah, terdapat 82 kelas dengan 2.419 orang murid dan 198 orang guru. Untuk tingkat SLTP sebanyak 2 sekolah, memiliki 22 kelas dengan 598 orang murid dan 44 orang guru. Sedangkan untuk tingkat SLTA terdapat 2 sekolah dengan 13 kelas, jumlah siswa ada 257 orang dan guru 51 orang. Selain itu terdapat pula sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, yaitu 2 sekolah Madrasah Tsanawiah dengan 17 kelas jumlah siswa 527 orang dan guru 47 orang, dan 2 sekolah Madrasah Aliyah dengan 12 kelas, jumlah murid seluruh 290 orang dan guru 40 orang.⁴⁵

6. Kesehatan

Jumlah sarana kesehatan pada tahun 2014 di Kecamatan Arungkeke tercatat 1 puskesmas, 1 puskesmas pembantu, 6 Poskosdes, dan 28 posyandu. Untuk tenaga

⁴⁵ Katalog, BPS 11 02011.7304.041, *Kecamatan Arungkeke Dalam Angka* (Badan Pusat Statistik, 2016), hal xvi

medis tercatat 1 dokter 25 paramedis, sedangkan dukun bayi sebanyak 17 orang.

C. Desa Kampala

1. Letak geografis dan Luas wilayah

Desa Kampala merupakan salah satu dari 7 desa di Kecamatan Arungkeke yang berbatasan Desa Bulu-Bulu di sebelah utara, Laut Flores di sebelah timur, Kelurahan Empoang Selatan disebelah barat dan Laut Flores di sebelah selatan. Desa Kampala Terdiri dari 4 dusun dengan luas wilayah 3,94 km².

2. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk desa Kampala dalam kurung waktu 2015 yakni, Berdasarkan jenis kelamin bahwa jumlah penduduk laki-laki sekitar 1,273 jiwa dan perempuan sekitar 1,285 jiwa. Dengan demikian rasio jenis kelamin adalah sekitar 0,95 yang berate setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat sekitar 95 orang penduduk laki-laki. Dari jumlah penduduk tersebut pada Tada table tampak 1.3 nampak bahwa Dusun Kalukuang memiliki penduduk yaitu 833 jiwa.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Desa Kampala

NO.	Dusun	Jumlah Penduduk	Jumlah K.K
1	Monroloe	643	167
2	P. Ka'buang	514	150
3	Buntulu	568	142
4	Kalukuang	833	225

Jumlah	2.558	684
--------	-------	-----

Sumber : Kantor Desa Kampala

3. Pemerintahan

Kegiatan Pemerintahan di Desa Kampala dilaksanakan oleh sejumlah aparatur desa yang jumlahnya 4 orang. Kemudian dibantu oleh Kepala Dusun berjumlah 4 orang, dan juga RK sebanyak 8 orang.

4. Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan di Desa Kampala, pada tahun 2014/2015 jumlah TK di Desa Kampala ada 2 sekolah, memiliki 6 kelas dengan 63 orang murid dan 12 orang guru. Tingkat SD, baik SD negeri maupun SD Swasta sebanyak 2 sekolah, terdapat 12 kelas dengan 245 orang murid dan 18 orang guru. Untuk Tingkat SLTP dan SLTA, belum terdapat di Desan Kampala.

7. Kesehatan

Jumlah sarana kesehatan pada tahun 2015 di Desa Kampala tercatat 1 Poskosdes, dan 4 posyandu. Untuk tenaga medis tercatat 5 paramedis, sedangkan dukun bayi sebanyak 4 orang.

8. Patron Klien Di Desa Kampala

Pada masa pasca kolonial, yakni setelah belanda meninggalkan tanah air di perkampungan/desa, kekuasaan akhirnya di serahkan penuh kepada raja atau karaeng yang berada di kampung itu salah satunya karaeng loloa di desa bulo-bulo.

Karaeng Loloa merupakan karaeng yang sangat di sanjung dan dihormati oleh masyarakat di desa bulo-bulo (sebelum menjadi desa kampala) karaeng loloa merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dan berperan penting dalam mempertahankan dan menjaga situasi desa dari gempuran kolonial belanda pada masa silam.

Hingga ketika suatu waktu silam, karaeng loloa akhirnya menjadi penguasa yang mempunyai banyak tanah, luas wilayah yang telah dimiliki oleh karaeng loloa sekitar $\pm 1,80 \text{ km}^2$, yang kini berada di Desa Kampala yakni desa dahulu nya bagian dari desa bulo-bulo sebelum kini mengalami pemekaran menjadi desa kampala.

Sebelum akhirnya karaeng loloa meninggal dunia, beliau mewariskan tanahnya yang begitu luas kepada anaknya yaitu kepada Patappoi karaeng Ke'nang sebagai generasi kedua, di era karaeng ke'nang ini akhirnya masyarakat mulai menempati tanah beliau untuk bermukim dan membuat rumah untuk ditempat tinggalnya, inilah cikal bakal hubungan patron klien di desa kampala.

Hubungan patron klien di desa kampala kini menjadi tumbuh subur di bawah kuasa Andi Tahal Fasni karaeng sutte (generasi ketiga). Karaeng suttee yang menjadi patron merupakan orang yang paling didengar didesa kampala secara umum terkhusus lagi di tanah yang menjadi miliknya yakni 2 dusun dari 4 dusun keseluruhan.

D. Historis Kabupaten Jeneponto

Pada masa kolonial belanda, bentuk pemerintahan pertama di butta turatea, berbentuk “kare”. Kare ini diberikan kekuasaan oleh raja Gowa (Sombayya Ri Gowa) untuk mengatur pemerintahan di Butta Turatea. Tetapi setiap tahun diahruskan atau diwajibkan mengirimkan orang-orangnya (Tau Ta’balakna) ke Gowa, kerja bakti (akkusiang) yang merupakan “upeti” atau tanda pengabdian kepada Gowa. Yang diangkat menjadi kare pertama di layu pada waktu itu ialah Indra Baji.

Setelah Indra Baji telah tiada, maka diangkat anaknya Ilayu oleh raja Gowa menjadi Kare di Layu ke II. Ilayu ini diperistrikan oleh Pari’ba dg Nyento, orang yang disegani dan dihormati dalam masyarakat ke-Kare-an Layu. Cerdas dan cemerlang pemikirannya. Baik hati, pemberani dan bertanggung jawab. Serta bertindak selalu membawa kebajikan pada orang banyak.⁴⁶

Kemudian Ilayu ini menyerahkan kekuasaan kepada suaminya menjadi Kare di Layu, yang restunya Sombayya ri Gowa (Raja gowa) menjadi Kare di Layu ke- III. Kemudian keudanya dikarunia beberapa orang anak, hingga pada selanjutnya ke Kare di Layu di serahkan kepada Nunneng. Nunneng ini diangkat menjadi Kare di Layu yang ke IV (yang terakhir) menggantikan orang tuanya Pari’ba dg nyento.⁴⁷

⁴⁶ Andi zainuddin s. *Tiga ungkapan sejarah turatea*. Makassar:Cv. Bila Utatara. 2001. Hal 7

⁴⁷ Andi zainuddin s. *Tiga ungkapan sejarah turatea..* Hal 7

Sebagaimana biasanya setiap tahun pemerintah Kare Layu mengirim orang-orangnya (rakyatnya) untuk kerja bakti ke Gowa. Rombongan kali ini dipimpin langsung oleh nunneng (Kare Layu) bersama orang tuanya Pari'ba dg nyento. Sesampainya di gowa rombongan tersebut diperintahkan oleh raja Gowa ke hutan dipimpin oleh Gallarang Mangngasa. Sesampainya di hutan rombongan tersebut diperintahkan untuk menebang pohon kayu yang sangat besar. Setelah pohon itu rubuh mereka diperintahkan oleh Gallarang Mangngasa untuk menarik dari ujung tanpa dihilangkan daun dan rantingnya. Pari'ba dg nyento yang melihat ini tidak terima dan merasa kecewa terhadap kesewenang-wenangan Raja Gowa.

Setelah kembali dari Gowa rombongan sampai di Layu, Pari'ba dg nyento mengundang semua tokoh-tokoh masyarakat Layu untuk membicarakan mengenai keluar dari kekuasaan kerajaan Gowa, yang kemudian menghasilkan beberapa poin seperti mereka mengirim utusan ke Gowa menyampaikan “pernyataan” bahwa rakyat Turatea ingin keluar dari kekuasaan Kerajaan Gowa, semua rakyat dari daerah kekuasaan kare yang ada di Butta Turatea harus bersatu apabila kemudian adanya serangan dari kerajaan Gowa. Kemudian Pari'ba dg Nyento juga mengusulkan nama dari pemerintahan kerajaan yakni “Binamu”.⁴⁸

Setelah pertemuan ini dibubarkan, akhirnya utusan rakyat Turatea menghadap ke Raja Gowa, dengan menyatakan bahwa Rakyat Turateya ingin berdiri sendiri dan tidak ingin lagi dikuasa oleh Kerajaan Gowa, pertanyaan ini kemudian membuat Raja Gowa sangat marah besar dan mengusir utusan dari rakyat Turatea ini. Rakyat Turatea yang merupakan persatuan pemuda-pemudi

⁴⁸ Andi zainuddin s. *Tiga ungkapan sejarah turatea..* Hal 10

dari berbagai ke Kare di Tanah Turatea ini kemudian bertekad melawan apabila sewaktu-waktu adanya serangan dari kerajaan Gowa yang tidak menerima pernyataan Rakyat Turatea ini.

Hingga pada hal yang dikhawatirkan rakyat Turatea ini terjadi, serangan dari kerajaan Gowa ini di kemudian di balas oleh pemuda-pemudi Turatea yang bertekad ini, saling serang kedua kubu berlangsung sangat panjang hingga pertempuran sangat seru setiap hari rakyat Turatea yang telah menguasai medan membuat pasukan raja Gowa merasa tertekan, membuat perahu-perahu mereka rusak dan beberapa pasukan di tawang oleh rakyat Turatea. Terpaksa sia-sia mereka menyerang. Maka berakhirlah peran antara Turatea dan Gowa.

Gowa mengalami kerugian yang sangat besar dibanding Turatea, setahun kemudian Raja Gowa memberikan kemerdekaan di butta Turatea dan memperbolehkan membentuk pemerintahan sendiri di butta Turatea. Pasuka Gowa yang ditahan di Layu sebagai tahanan perang dikembalikan ke Gowa.

1. Pembentukan Kerajaan Binamu

Pada sebelumnya diceritakan bahwa setelah persekutuan KARE di Turatea berhasil memenangkan pertempuran dengan Kerajaan Gowa, dan setelah Kerajaan Binamu terbentuk berkat dari hasil kesepakatan dengan Sombayya Ri Gowa, maka persoalan yang tersisa tinggal satu, yaitu siapa kira-kira yang pantas memakai mahkota pertama Kerajaan Binamu.

Oleh karena itu, Kare Layu sebagai ketua dari tujuh persekutuan ke-kare-an segera mengutus Boto Cabiri dan Boto Jombe untuk mencari calon raja sesuai

dengan persyaratan yang telah ditentukan. Mula-mula mereka di suruh ke Boyong, setelah itu ke Balang, kemudian ke Tolo' dan Rumbia, dan terakhir di Manynyumbeng.⁴⁹

Sesuai hasil penilaian para utusan, empat tokoh dari empat tempat yang didatangi pertama yakni Boyong, Balang, Tolo, dan Rumbia, tidak bisa menjadi Raja di Binamu karena caranya menghadapi tamu yang kurang bijaksana dan cenderung tergesa-gesa. Maka pilihan jatuh pada Gaukang Dg. Riolo, tokoh dari Manynyumbeng yang berbudi pekerti luhur, dermawan, berjiwa besar, agak pendiam, dan sabar dalam menghadapi setiap problema yang dihadapinya.

Setelah segala sesuatu yang berhubungan dengan acara pelantikan "*kakaraengan*" sudah dipersiapkan secara matang, maka dijemputlah Gaukang Dg Riolo di kediamannya untuk dibawa ke Layu menjalani prosesi pelantikan raja sesuai prosedur yang sudah disepakati. Hadir pula beberapa undangan dalam acara tersebut yakni Raja Gowa, Raja Luwu, Raja Suppa, dan Raja Bone, serta tokoh-tokoh dari tujuh persekutuan ke-kare-an di Turatea bersama rakyatnya. Acara pelantikan berjalan selama tujuh hari tujuh malam.

Sekedar diketahui bahwa Gaukang Dg Riolo sebenarnya adalah salah seorang keturunan dari Pari'ba Dg Nyento. Beliau putra dari anak Pari'ba yang kawin ke Manynyumbeng. Artinya, beliau tidak lain adalah salah seorang cucu Pari'ba selain cucu-cucunya yang lain yang tersebar di Boyong, balang, Tolo, dan Rumbia. Oleh karena itu, dilihat dari segi keturunan dan status sosial di Turatea,

⁴⁹ Andi Zainuddin Suwaib. *Sejarah Turatea*. Makassar: Yayasan Karya Lontara Makassar Sulawesi Selatan Turatea Kabupaten Jeneponto. 2015. Hal 35

beliau memang pantas menduduki takhta Kerajaan Binamu, dan tentu saja didukung dengan sikap dan kepribadian yang luhur dan bijaksana.

Setelah pelantikan Gaukang Dg Riolo usai, maka serta merta berakhirlah bentuk pemerintahan KARE di Turatea dan dimulailah pemerintahan Kerajaan BINAMU. Sebagai raja pertama, beliau diberi gelar “KARAENG LOMPOA RI BINAMU” (Maha Raja Binamu).

Sebagai langkah awal dalam pemerintahannya, beliau membentuk beberapa lembaga untuk mendukung kerajaannya diantaranya:

1. Lembaga Pertahanan Kerajaan (panglima perang): Daenta Bonto Tangnga
2. Lembaga Pengadaan Pangan (ekonomi): Daenta Balumbungan
3. Lembaga Kesejahteraan/Sosial: Gallarang Embo
4. Dewan Penasehat (Agama): Boto Cabiri
5. Dewan Hakim: Boto Jombe⁵⁰

Selain itu, Gaukang Dg Riolo juga mengadakan beberapa perubahan istilah, dari Daenta dan Gallarang menjadi Karaeng, tetapi tugas dan kedudukannya tetap sama. Seperti: Daenta Bonto Tangnga diubah menjadi Karaeng Bonto Tangnga, Daenta Bontoramba menjadi Karaeng Bontoramba, Gallarang Paitana menjadi Karaeng Paitana, dan sebagainya.

Kerajaan Binamu memiliki beberapa kerajaan bawahannya, diantaranya:

⁵⁰ Andi zainuddin s. *Tiga ungkapan sejarah turatea*. Hal 48

1. Gallarang di Balang
2. Karaeng di Bontoramba
3. Karaeng di Balumbungan.
4. Karaeng Bontotangnga⁵¹

Untuk Kerajaan Arungkeke, Tarowang, dan Bangkala, ketiganya merupakan kerajaan tersendiri yang otonom sejajar dengan kerajaan Binamu di Butta Turatea. Mereka tidak saling membawahi tapi tetap saling berinteraksi dan saling berbagi karena faktor kesamaan bahasa, budaya, tradisi, dan adat istiadat satu sama lain.

2. Pemerintahan Awal Kemerdekaan

Diantara sebagian besar generasi muda Indonesia dewasa ini, termasuk juga generasi muda Turatea (Binamu – Jeneponto) mungkin hanya sedikit sekali yang mengenal dan mengetahui tokoh-tokoh pejuang Turatea baik sebelum kemerdekaan maupun sesudah proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945. Pengenalan dan pengetahuan yang terbatas itu merupakan hal yang wajar dan bisa dipahami, mengingat tidak semua orang yang terlibat dan berperan dalam setiap “fase” perjuangan di masa lalu yang mendapat tempat dalam suatu penulisan sejarah perjuangan.

Seperti juga yang terjadi di Binamu-Jeneponto, para pemuda pejuang berusaha dengan keras mengadakan hubungan dengan pemimpin-pemimpinnya didearah ini. Pimpinan Republik yang sering datang ke jeneponto yaitu Lanto Dg

⁵¹ Andi zainuddin s. *Tiga ungkapan sejarah turatea*. Hal 31

Paewang, beliau adalah pimpinan Organisasi “SAUDARA” yang berkedudukan di Makassar.

Demi kepentingan perjuangan, Lanto Dg Pasewang memberikan arahan kepada pemuda-pemuda untuk mengadakan pertemuan bagi pemuda-pemuda rakyat Jeneponto untuk menghimpun melawan kekuatan penjajah. Maka diadakanlah pertemuan pertama kalinya di Balumbungan pada bulan September 1945 yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat Turatea Jeneponto. Hasil dari pertemuan tersebut, lahirlah organisasi perjuangan di daerah ini yang diberi nama “Gerakan Muda Turatea” disingkat GMT, Pimpinan dari GMT ini sendiri ialah Malajong Dg Liwang.⁵²

Pada saat itu para pemuda dan rakyat gencar mengumandangkan pekik merdeka, yang menjadi tanda salam perjuangan menggema di sana-sini. Melihat pemuda – pemuda yang gagah berani, Belanda yang ingin kembali menanamkan kekuasaannya menempel pada sekutu seperti benalu, tentunya tidak tinggal diam melihat pemuda-pemuda kita yang berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsanya. Belanda akan mengatur kembali pemerintahan Indonesia.

Di Jeneponto, Belanda akan menempatkan kembali seorang Controleur, demikian pula di daerah–daerah lain di Sulawesi-Selatan, mendengar hal ini GMT tidak tinggal diam dan pemuda-pemuda kembali bersiap untuk melakukan perlawanan walau itu harus mengangkat senjata.

⁵² Andi Zainuddin Suwaib. *Sejarah Turatea*. Makassar: Yayasan Karya Lontara Makassar Sulawesi Selatan Turatea Kabupaten Jeneponto. 2015. Hal 156

E. Gambaran Umum Pemilihan Kepala Desa Kampala Tahun 2015

Pelaksanaan pemilihan kepala desa Kampala pada tahun 2015 di ikuti oleh 2 orang calon, yaitu yang pertama HJ Rosmiati dengan nomor urut (1) dan yang kedua Baco dengan nomor urut (2), adapun jumlah pemilih yang terdaftar sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 1.955 orang.

Pemungutan suara dilaksanakan di samping rumah adat desa Kampala, dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2015. Perolehan suara terbanyak diperoleh oleh ibu HJ Rosmiati sebanyak 1.293 suara dan Baco sama sekali tidak mendapatkan suara.

Berikut Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan kepala Desa Kampala 2015.

No	Nama Calon	Nomor Urut	Jumlah Suara
1	Hj. Rosmiati	1	1.293
2	Baco	2	0

Sumber Informasi : Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa

1. Pemilih

- a. Jumlah Pemilih : 1.965 Orang
- b. Pemilih yang melaksanakan hak memilih : 1.294 Orang

2. Surat Suara

- a. Jumlah Suara Sah : 1.293. Lembar
- b. Jumlah Suara Tidak Sah : 1 Lembar

BAB III

PEMBAHASAN

A. Hubungan Patron Klien dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Desa Kampala Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto.

Hubungan kekuatan antara patron dan klien menjadi suatu norma yang mempunyai kekuatan moral tersendiri dimana didalamnya berisi hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Norma-norma tersebut akan dipertahankan sejauh memberikan jaminan perlindungan dan keamanan dasar bagi klien. Usaha-usaha untuk merusmuskan kembali hubungan tersebut kemudian dianggap sebagai usaha pelanggaran yang mengancam struktur interaksi itu sehingga sebenarnya kaum elitlah/patronlah yang selalu berusaha untuk mempertahankan sistem tersebut demi mempertahankan keuntungannya. Hubungan ini adalah berlaku wajar karena pada dasarnya hubungan sosial adalah hubungan antar posisi atau status dimana masing-masing membawa perannya masing-masing. Peran ini ada berdasarkan fungsi masyarakat atau kelompok, ataupun aktor tersebut dalam masyarakat, sehingga apa yang terjadi adalah hubungan antar posisi dikeduanya.

1. Hubungan Jasa (Balas Jasa)

Hubungan Jasa (balas jasa) yang dimaksudkan disini adanya hubungan timbal balik antara Tuan tanah (patron) dan Masyarakat (klien) yang menepati tanah tersebut. Tuan tanah selaku patron menyediakan tempat atau lahan yang kemudian dikelola oleh masyarakat di desa

tersebut kemudian secara tidak langsung menjadikan hubungan ini terikat. Masyarakat selaku pengelola tanah yang menempati tanah tersebut merasa berhutang budi kepada Karaeng, karaeng yang dimaksud disini gelaran bangsawan dari sang tuan tanah yang menjadi patron di desa tersebut.

Pertukaran jasa ini kemudian menjadikan masyarakat merasa terbantu oleh adanya hubungan ini, kemudian imbalan yang didapatkan oleh tuan tanah dari hubungan ini yakni masyarakat harus patuh kepadanya apabila kemudian hal ini di abaikan oleh masyarakat maka ada kemudian resiko yang ditanggungnya, seperti yang di katakan oleh salah satu informan, yakni :

“Sebagian besar masyarakat di desa Kampala ini tinggal diatas tanah karaeng (patron), kami diberikan kesempatan untuk membangun rumah serta mengelolah tanah menjadi hasil bumi, timbal baliknya adalah kami merasa sadar dan secara tidak langsung akan patuh kepada karaeng (patron), apabila kemudian ini dilanggar maka konsekuensinya adalah harus meninggalkan tanah yang menjadi milik dari karaeng (patron) tersebut.⁵³

Menurut wawancara diatas tersebut, bahwa dari hubungan balas jasa ini kemudian menjadikan karaeng yang selaku tuan tanah (patron) sebagai orang yang paling dihargai di desa Kampala, walaupun di desa tersebut masih ada tanah yang bukan merupakan milik dari karaeng (patron) tapi ini secara tidak langsung menjadikannya sebagai penguasa

⁵³ Wawancara dengan Adrian (masyarakat) tgl 24 Februari 2016 di kediaman beliau desa Kampala

atau elit di desa tersebut yang sangat berpengaruh dalam penentuan kebijakan di desa Kampala ini.

Seperti yang dikatakan oleh Harold Lasswell bahwa elit yang berkuasa merupakan suatu kelas yang terdiri atas mereka yang berhasil mencapai kedudukan dominasi yang dianggap bahwa elit adalah individu-individu yang menduduki posisi puncak dalam berbagai institusi. Menurutnya pula individu-individu yang termasuk dalam kelompok elit merupakan golongan yang relatif sangat terpadu, homogen dan erat berhubungan satu dengan lainnya.

Tuan tanah (patron) selama ini memang mendominasi kekuasaan di desa Kampala, dari hubungan balas jasa ini kemudian pengaruhnya dapat menjalar ke berbagai sektor lainnya seperti sektor politik dan ekonomi. Ini tidak terlepas dari adanya kemudian resiko yang tertanam jelas dalam diri masyarakat bahwa dari hubungan balas jasa ini ada yang mesti menjadi balasan kepada karaeng (patron) yakni patuh terhadap apa yang diperintahkan karaeng (patron).

2. Hubungan Politik

Berangkat dari Hubungan Jasa (balas jasa) pola hubungan patron klien di desa Kampala menjalar kepada suatu hubungan politik yang adanya kepentingan yang di ingin dicapai oleh tuan tanah (patron) melalui blasan jasa dari masyarakat (klien) yang menempati tanahnya tersebut. Hubungan politik ini kemudian di anggap semakin memperkuat kedudukan seorang karaeng (patron) di desa tersebut dalam setiap ajang

politik, , mulai dari pemilihan presiden sampai pada tingkat pemilihan kepala desa.

Hubungan inilah yang kemudian dianggap sebagai hal yang melegitimasi kekuasaan dari karaeng (patron) dalam menentukan calon kandidat kepala desa di desa Kampala dalam pemilihan kepala desa pada tahun 2015, dengan mengusung kembali istrinya sebagai calon kepala desa petahana untuk periode ke dua.

Pemilihan kepala desa di desa Kampala pada tahun 2015, berhasil mengantarkan kembali di Hj. Rosmiati Kr Lebong setelah sebelumnya pada tahun 2011 terpilih untuk pertama kalinya, Hj.Rosmiati Kr Lebong merupakan Calon yang diunggulkan pada pemilihan kepala desa pada periode ini, Istri dari karaeng (patron) di desa Kampala. Kekuasaan Karaeng (patron) inilah yang menjadi pertimbangan masyarakat diluar dusun yang dikuasainya untuk melawan dalam pemilihan kepala desa tersebut.

Pemilihan kepala desa di desa Kampala tergolong menarik bagi penulis untuk meneliti, dimana dari 41 desa yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Desa Kampala keluar sebagai desa paling aman dan partisipasi politik dari masyarakat cukup tinggi. Pemilihan Kepala desa di desa Kampala yang telah menarik perhatian penulis ini karena di mana masyarakat masih sangat menaruh harapan penuh kepada Keluarga Patron, ini tidak lepas dari adanya hubungan balas jasa dari antara Karaeng (patron) dengan masyarakat (klien) yang telah di

patuhi oleh masyarakat sendiri kemudian masyarakat (klien) menyerahkan seluruhnya kepada patron atau tuan tanah untuk menentukan calon kandidat yang harus masyarakat desa Kampala yang akan dipilih, ini terbukti dari pemilihan kepala desa tahun 2015 yang ternyata kurangnya antusias melawan kandidat dari keluarga sang tuan tanah (patron).

Berikut adalah kutipan hasil wawancara dengan bapak Djahuddin sebagai Sekertaris Desa:

“Pemilihan kepala Desa Kampala memang berbeda dengan desa yang lain, kalau di sini keluarga dari Kr Sutte (tuan tanah) yang mencalonkan kepala desa pasti itulah yang dipilih oleh masyarakat, tidak ada masyarakat yang berani untuk melawan dari keluarga Kr Sutte (tuan tanah) masyarakat menganggap bahwa untuk melawan kandidat beliau hanya akan buang-buang uang dan waktu saja karena masyarakat sudah memastikan keluarga beliau yang akan menang. Walaupun pada akhirnya pemilihan kepala desa ini ada 2 calon yang bersaing tapi yang melawan Kr Lebong (Keluarga Patron) adalah orang dari keluarga patron, cuman pesuruh dari keluarga dari Kr lebong (keluarga Patron), bahkan calon lawan dari Kr Lebong itu sendiri tidak memilih dirinya melainkan memilih Kr lebong.⁵⁴

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa keluarga Patron yang menjadi elit di desa tersebut sudah berhasil menjadi ujung tombak di desa tersebut, patron yang merupakan elit tersebut dianggap sebagai panutan oleh masyarakat tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh Pareto dan Mosca, bahwa kehadiran elit politik itu adalah penting dan bahkan merupakan ciri khas semua

⁵⁴ Wawancara dengan Djahuddin (Sekertaris Desa) tgl 15 Februari 2016 di kantor desa Kampala

masyarakat. Ini membuat penguatan teradap makna yang terkandung di dalam model elit ini, bahwa model elit mempunyai pembawaan yang penuh dengan permainan politik di dalam masyarakat. Di mana model elit ini memberikan penyadaran bahwa dalam hal konteks sebagian masyarakat yang memerintah ini merupakan kelompok masyarakat yang syarat akan permainan politik, baik dalam proses mendapatkan kekuasaan maupun dalam mengimplementasikan segala tindakan yang ia dapatkan dari kekuasaan yang ia miliki

Karaeng (patron) yang menjadi elite dianggap orang yang sangat berpengaruh dan disengani oleh masyarakat desa Kampala, juga membuat keluarganya atau kerabatnya menjadi orang disengani di tanah yang ditempati oleh masyarakat selama desa Kampala selama puluhan inilah yang menjamin kekuatan tuan tanah dibidang politik begitu sangat kuat dan berpengaruh, semua yang Karaeng (patron) katakan akan didengar langsung oleh masyarakat (klien) yang tinggal diatas tanah beliau.

Masyarakat yang rata-rata pekerjaan sehari-harinya bertani hanya sibuk mengurus ladang mereka, mereka diberikan kewenangan penuh oleh tuan tanah untuk mengelolah tanah yang mereka tempati dengan bertani bawang merah, lombok, rumput laut dan lain sebagainya.

Adapun yang unik dalam penyelenggaran pemilihan Kepala Desa di Desa Kampala ini yakni :

1. Rekrutmen Bakal Calon

Rekrutmen Bakal Calon pada pilkades kali ini boleh dikatakan sangat sulit untuk mencari bakal calon melawan petahana sang keluarga tuan tanah (patron). Kurangnya figur dari masyarakat membuat penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Desa Kampala sempat sebelumnya bakalan ditunda. Hingga pada akhirnya kandidat yang mencalonkan diri sebagai lawan dari istri karaeng (patron) ini diutus pesuruh dari nya sendiri, seperti yang di katakan oleh informan tersebut:

“Merasa sadar ji ikut pemilihan kepala Desa Kampala 2015 bahwa saya tidak akan terpilih karena lawan yang saya temani ini merupakan lawan kuat. Pemilik tanah terluas yang ditempati oleh masyarakat, sehingga otomatis masyarakat lebih memilih beliau, saya juga adalah dari keluarga Ibu Kepala Desa, cuman dalam kesempatan ini saya merasa harus menjadi calon kepala desa supaya Ibu punya lawan dan dinyatakan lolos untuk memenuhi syarat terlaksananya Pemilihan desa serentak di Desa Kampala ini.”⁵⁵

2. Hak Politik

Berbicara tentang hak politik di Desa Kampala pada setiap penyelenggaraan even politik mulai dari pemilihan presiden, kepala daerah sampai pada tingkat pemilihan kepala desa, Hak masyarakat yang menempati tanah sang pemilik tanah (patron) seluruhnya mereka serahkan kepada tuan tanah (patron) untuk menentukan siapa yang bakalan dia pilih, masyarakat (klien) tinggal datang untuk mencoblos kandidat utusan dari sang tuan tanah (patron).

Berikut wawancara terhadap salah satu informan:

⁵⁵ Wawancara dengan Baco (Calon Kepala Desa) tgl 20 februari 2016 di rumah beliau.

“untuk masalah hak politik atau untuk siapa yang akan kami pilih di pemilihan kepala desa itu sudah jelas bahwa kami harus mengikut kepada arahan dari tuan tanah dalam hal ini adalah istri beliau sendiri yang menjadi kandidat yang paling kuat di Desa Kampala ini”⁵⁶

Pola patronase dalam masyarakat desa Kampala otomatis akan selalu hadir dalam kehidupannya, sejak masa lalu hingga pada saat yang sekarang. Patronase dalam kehidupan sosial dan politik menggambarkan hubungan masyarakat dalam berkehidupan. Pada saat ini gambaran pola patron klien dalam masyarakat Kampala begitu diidentikkan dengan kehadiran posisi khusus yang diisi oleh Karaeng (patron) diikuti oleh keluarga dan kerabat dekat.

3. Hubungan Ekonomi

Dari pola hubungan ekonomi di tengah masyarakat (patron) di desa Kampala sendiri berjalan dengan baik, masyarakat di berikan tempat untuk bermukim juga tak lepas dengan mengelolah tanah tersebut seperti membuka usaha atau mengelolah lahan dengan bercocok tanam hasil bumi demi kebutuhan sehari-hari. Dari segi ekonomi ini nampaknya Karaeng (patron) tidak terlalu mengintervensi hasil bumi masyarakat, karaeng (patron) lebih memberikan leluasa kepada masyarakat untuk mengelolah tanah tersebut menjadi hasil bumi, namun biasanya masyarakat sendirilah yang sadar dengan memberi sedikit atau banyaknya hasil bumi kepada karaeng (patron) sebagai upah dari tanah karaeng (patron) yang dikelola oleh masyarakat (klien) dari hasil bercocok tanam ini.

⁵⁶ Wawancara dengan Dg Sirua (Tokoh Masyarakat) tgl 28 Februari 2016 di Kediaman Beliau

Pola hubungan ekonomi ini sendiri bukan cuman memanfaatkan hubungan antara karaeng (patron) dengan masyarakat (klien), juga karena masyarakat merasakan kehidupannya dari segi ekonomi juga diperhatikan oleh kepala desa yang selaku pemegang otoritas kebijakan di desa tersebut, walaupun dalam hal ini yang menjadi kepala desa di desa Kampala sendiri ini adalah istri dari karaeng (patron) namun nampaknya tidak menyampingkan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat yang tidak mampu melalui wewenangya. Seperti yang di katakana oleh salah satu informan, yakni :

“Selama saya menempati tanah ini sejak tahun 1951, saya merasa terbantu dengan kebaikan dari keluarga ibu kepala desa, tidak pernah ada intimidasi, cuman kami yang harus sadar bahwa apabila ada yang perlu dipatuhi oleh kami. Selama ibu kepala desa menjabat, bantuan sosial berupa pembagian sangat merata untuk masyarakat miskin jadi tidak ada dibilang cemburu-cemburu dan juga kalau ada masyarakat yang sakit ibu kepala desa memberikan jaminan. Kesejahteraan masyarakat di desa kami jua sangat diperhatikan oleh ibu kepala desa jadi tidak ada alasan bagi kami selama ini mau pindah karna sudah lama tinggal ditempat ini, dari masih ada nenekku. Tetapi kalau ada yang kemudian masyarakat yang menempati tanah karaeng tidak patuh atau tidak ikut kepada karaeng kalau adanya suatu pemilihan maka harus meninggalkan tanah tersebut.⁵⁷

Menurut wawancara diatas dari tersebut, bahwa selain menjadi penguasa elite di desa tersebut, kepala desa tidak menyampingkan hal kesejahteraan masyarakat tersebut terbukti bahwa selama ini pembagian raskin maupun bantuan sosial lainnya cukup merata di tengah masyarakat yang membutuhkan, seperti yang dikatakan pula oleh Max Weber bahwa kekuasaan harus membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan bukan

⁵⁷ Wawancara dengan Mustafa dg serang (Tokoh Masyarakat). 15 Februari 2016 di Rumah beliau

mendatangkan dominasi yang mengakibatkan ketidakadilan dan diskriminasi politik bagi masyarakat.

Masyarakat (patron) akan selalu berlandung kepada karaeng (patron) didesa Kampala ini tersebut dikarenakan kebutuhan ekonomi mereka diperhatikan pula oleh karaeng (patron) terlepas dari itu walaupun mereka merasa ada keterikatan hubungan yang perlu di taati ini tidak menjadikan mereka untuk mereka keluar dari tempat yang selama ini menjadi tempat mereka melangsungkan hidupnya selama ini.

4. Hubungan Komando

Hubungan Komando yang dimaksud ini adalah, hubungan yang bersifat vertikal dimana Tuan tanah (patron) selaku atasan dan Masyarakat (patron) yang menempati tanahnya tersebut adalah bawahan. Tentunya hubungan ini tidak terlepas pula dari adanya hubungan balas jasa sebagai mana yang dijelaskan oleh penulis pada bagian diatas bahwa yang melatar belakangi hubungan patron klien di desa Kampala ini yakni adanya Tuan tanah yang menadi patron menyediakan tempat unuk masyarakat (klien) untuk di tempati ataupun dikelola.

Berangkat dari hubungan balas jasa inilah, kemudian muncul pula pola semacam hubungan komando, dimana yang menjadi pemegang komando di desa Kampala adalah seorang tuan tanah(patron) atau yang mereka sebut dengan gelaran karaeng. Masyarakat (klien) yang diberikan tempat untuk bermukim diatas tanah karaeng (patron) harus patuh kepada setiap instruksi atau perintah dari sang karaeng (patron) dari berbagai

pegelaran atau suatu hajatan baik bersifat umum maupun pribadi. Bahkan ketika karaeng (patron) menggelar pesta atau hajatan pernikahan atau lainnya maka masyarakat diminta untuk membantu kebutuhan dari acaranya tersebut baik berupa perlengkapan maupun kepada kelangsungan acara tersebut. Seperti yang dikatakan oleh salah satu informan yang mengatakan, bahwa :

“kami masyarakat yang tinggal di atas tanah karaeng akan selalu menjadi orang yang paling setia kepada karaeng, apapun yang karaeng perintahkan pasti akan kami ikuti, bukan cuman pemilihan kepala desa atau pemilihan lainnya saja tapi juga apabila karaeng membutuhkan kami apabila menggelar acara dirumahnya kami juga harus membantu untuk mensukseskannya”.⁵⁸

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kekuasaan karaeng (patron) memang sangat di segani oleh masyarakat (klien) yang menempati tanahnya tersebut. Hubungan komando ini semakin mempertegas kekuasaan seorang karaeng (patron) di desa Kampala ini akan semakin harmonis ditengah masyarakat luar yang sudah modern yang memandang hidup dengan persamaan hak tanpa adanya suatu hubungan yang tidak seimbang ini.

Tidak terlepas dari itu, banyaknya pengaruh dari luar tidak lantas mengurungkan niat para masyarakat (klien) yang menempati tanah tersebut untuk keluar dari desa Kampala ini, kekuasaan karaeng (patron) yang dipatuhi oleh masyarakat (klien) ini jugalah yang menjadi alasan masyarakat masih percaya kepala istri karaeng (patron) untuk tetap menjadi kepala desa pada periode kedua, seperti yang dikatakan oleh salah satu informan, bahwa :

⁵⁸ Wawancara dengan daeng tiro (masyarakat) ygl 25 februari 2016 di kediaman beliau desa kampala

“Kekuatan dari keluarga Ibu Kepala Desa masih sangat kuat, terbukti dari beberapa pesta demokrasi pengeruh dari keluarga beliau sangat dirasakan dan diperhitungkan, hampir yang menjadi pilihan dari keluarga beliau dipilih oleh masyarakat Desa Kampala. Konsekuensi apabila ada masyarakat yang ternyata tidak ikut terhadap perintah dari keluarga beliau ialah harus keluar dari tanah milik keluarga Ibu Kepala Desa tapi walau begitu di sisi lain masyarakat merasa terbantu dan merasakan hidup sejahtera di bawah kekuasaan keluarga patron, apalagi sarana dan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dan jaminan sosial juga merata kepada masyarakat”.⁵⁹

Kekuasaan dari kepala desa memang tidak terpisahkan dari kekuasaan yang dimiliki oleh Patron yang menjadi elite di desa tersebut, Kekuasaan ini menurut Max Weber adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu..

Kekuasaan inilah yang kemudian menglegitimasi kekuasaan yang dimiliki oleh sang patron (tuan tanah) yang menjadi elite di desa Kampala, meski kemajuan dan perubahan masyarakat berjalan dalam dinamikanya, tetapi kecenderungannya hanya berubah tataran kekuatan dan kadarnya yang memungkinkan status sosial dalam suatu masyarakat masih direproduksi sehingga orientasi dan implikasinya terlihat dalam struktur masyarakat, salah satunya dalam ranah politik cukup mempengaruhi hirarki kekuasaan.

Di Desa Kampala dari aspek pola hubungan patron klien membagi masyarakat ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok masyarakat yang disegani atau terhormat dan kelompok masyarakat biasa. Kelompok masyarakat yang terhormat, umumnya menekankan arti penting akar sejarah

⁵⁹ Wawancara dengan Amal Ramadhan (Tokoh Pemuda) tgl 15 Februari di Rumah beliau

yang dijadikan dasar untuk membenarkan kedudukan istimewa mereka di masyarakat. Seorang kerabat dari karaeng (patron), misalnya akan selalu tampil terhormat di masyarakat, dan dalam beberapa hal tidak memperlihatkan ketertarikan untuk memasuki atau dimasuki kelompok biasa karena ada keinginan untuk mempertahankan kemurnian darah kebangsawanan-nya.

Dalam kondisi normatif pada saat ini, proses politik lokal sudah diakomodasi dalam sebuah sistem politik baku melalui undang-undang, namun secara umum dalam kondisi masyarakat, praktek-praktek tertentu yang sedikit banyak terpengaruh melalui budaya yang ada dalam satu daerah tertentu misalnya penguasaan modal simbolik ataupun status sosial masih digunakan namun tidak sebesar seperti fungsi dan keberadaannya seperti dahulu utamanya dalam menjelaskan proses dalam pembentukan modal simbolik ataupun status sosial yang dimiliki oleh seseorang, khususnya seorang aktor atau calon pada sebuah pemilihan semisal pemilihan kepala desa di Desa Kampala.

Salah satu hal yang sangat mendorong eksistensi kepercayaan tradisional Desa Kampala bertahan dalam pemahaman masyarakat setempat pada beberapa periode adalah pelaksanaan kepercayaan, rasa kepasrahan pada nilai sosial dan ritus budaya itu sendiri. Seperti pada penjelasan sebelumnya, seperti contoh dalam kondisi masyarakat setempat dalam menentukan pemimpin, terdapat ritual dan lain sebagainya yang mengantar seorang penguasa tanah yang menjadi patron menjadi seorang pemerintah atau

pemegang otoritas kuasa di wilayah tersebut. Tidak hanya itu posisi tersebut kemudian menggaris tebakkan gambaran pola patron klien yang ada di dalam kehidupan masyarakat desa Kampala. Seorang elite yang patron ataupun yang berasal dari keturunannya serta kerabat dekatnya begitu. Nampak menjadi pengisi posisi seorang patron dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Dari hal tersebut menjelaskan tentang modal yang dimiliki oleh seorang yang berasal dari kalangan patron yang berpengaruh khususnya di wilayah Desa Kampala.

B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Hubungan Patron Klien Masih Erat Di Desa Kampala

Nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat, begitu kuat mengakar sejak waktu lalu hingga sekarang, namun tidak dapat dipungkiri pula seiring perkembangan situasional dan diikuti oleh dinamikanya, nilai-nilai sosial dalam lingkaran budaya yang menjadi tata aturan hidup dalam segala hal bidang kehidupan bermasyarakat oleh setiap individu dan kelompok sosial secara keseluruhan beberapa dari keseluruhan kumpulan nilai tersebut masih sangat kuat.

Lokal khususnya dalam konteks pilkades di desa Kampala Kabupaten Jeneponto hingga pada saat ini yang telah melewati beberapa kali tahapan pemilihan langsung. Dari keseluruhan perihal tersebut menjadikan analisis menarik bahwa nilai-nilai patron klien di desa kampala yang sejak dahulu mengakar kuat masih erat sampai saat ini.

1. Faktor kebutuhan primer yang ingin dipenuhi oleh masyarakat

Salah satu penyebab yang melatar belakangi hubungan patron klien didesa kampala masih sangat erat selama ini yakni kebutuhan adanya kebutuhan primer yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat membutuhkan tempat tinggal sedangkan patron selaku tuan tanah di desa tersebut memberikan itu kepada masyarakat. Bagi pandangan yang bersifat materialistis ini, gagasan dan nilai merupakan pencerminan dari kepentingan saja. seperti yang dikatakan salah seorang narasumber :

“Yang melatar belakangi hubungan patron klien di Desa Kampala erat selama ini yakni, keluarga ibu kepala desa yang merupakan tuan tanah (ahli waris), atau pemilik sebagian besar tanah di Desa Kampal 2 dari 4 dusun merupakan tanah dari keluarga ibu kepala desa. Orang yang menempati tanah dari keluarga ibu kepala desa diizinkan tinggal tanpa biaya sepeserpun, asalkan masyarakat yang tinggal di tanahnya harus ikut dalam setiap keputusan dari keluarga ibu kepala desa.”⁶⁰

Dari penjelasan informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu faktor penyebab masyarakat memilih kepala desa karena adanya kepentingan tertentu yang harus terpenuhi. Hal tersebut telah mengindikasikan bahwa pola patronase dalam masyarakat sedikit banyaknya telah terpengaruh dengan adanya unsur pilihan rasionalitas atas pemenuhan kebutuhannya pada saat itu juga. Namun yang harus menjadi perhatian demi perkembangan kehidupan politik ideal, adalah situasi dimana faktor finansial dan yang bersifat materialistik pragmatis demi kepentingan politik elit semata harus dipahami sebagai penghambat kehidupan politik yang dicita-citakan

⁶⁰ Wawancara dengan Rustam (KAUR UMUM Desa Kampala) tgl 27 februari 2016 di kantor desa Kampala

bersama. Meski disadari bersama tak jarang strategi sedemikian sering dilakukan oleh seorang actor/calon dalam pemenangan, dalam memikat dukungan massa pada pemilihan langsung.

Berikut salah satu hasil wawancara lagi dengan informan :

“Kami tinggal dan hidup diatas tanah karaeng suttee (patron) selama puluhan tahun dan sebagai balasannya kami harus ikut kepada aturan dari beliau, baik itu pada saat ada pemilihan maupun ketika beliau memerlukan bantuan kami, kebutuhan kami Alhamdulillah terpenuhi berupa tempat tinggal dan ketika istri beliau yang menjadi kepala desa, bantuan lain berupa pembagian raskin dan BLT itu termasuk adil untuk masyarakat yang membutuhkan”⁶¹

Keadaan dan situasi sosial serta politik masyarakat setempat memang masih terdapat persamaan dengan pola patronase di waktu lalu, namun yang membedakannya adalah perhitungan kompensasi atas jasa yang telah didapatkannya, baik secara ekonomi, batiniah, perlindungan dan lain-lain yang bersifat terus menerus dan tidak terputus antara hubungan sang patron dan klien pada saat itu saja. Pola patronase yang berdasarkan pengamatan dan penelitian penulis mendapatkan bahwa hubungan sosial dan politik pada saat ini di wilayah setempat bisa saja berubah tergantung dari aspek rasionalitas yang dipahami masyarakat desa Kampala pada umumnya termasuk khususnya pada penentuan dukungan kepada aktor politik dalam suksesi pemilihan kepala desa.

⁶¹ Wawancara dengan Asmawati (Masyarakat) tgl 28 Februari 2016 di kediaman beliau

2. Faktor kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pendidikan politik

Dalam observasi lapangan penulis juga mendapati salah satu faktor penyebab pergeseran nilai politik di daerah tersebut karena pemahaman masyarakat akan pendidikan politik yang masih rendah, atau dengan kata lain perkembangan dan perbedaan situasi yang ada tidak diikuti oleh pola transformasi pengetahuan yang dibutuhkan contohnya pendidikan politik guna menselaraskan dinamika tersebut. Berbeda halnya dengan proses sosial dan politik masa lalu yang diikuti oleh tatanan adat, nilai, norma dan etika yang kuat sebagai kepercayaan yang menjadi payung proses tersebut. Di desa Kampala masih sangat kental watak dasar politik patrimonial yang tetap berlangsung. Penguasa lokal yang menjadi patron memerankan diri sebagai raja bagi komunitas yang dipimpinnya dengan imbalan tanah tempat bermukim warga. Pemeran politik patrimonial masih terpusat pada satu individu, seorang karaeng yang merupakan tuan tanah di desa tersebut.

“Sebagian besar warga di desa kampala ini lebih mengikut serta kepada pilihan pilihan karaeng yang menjadi tuan tanah, apalagi kami yang tinggal diatas tanah belaiu sudah pasti akan menikut kepada perintah beliau, siapapun itu orangnya kalau beliau yang menunjuk pasti kami akan memilihnya, tidak ada pula orang yang berani melawan kandidat beliau dari dusun sebelah yang bukan merupakan tanah kekuasaan beliau”.⁶²

Hasil Wawancara dari informan tersebut menggambarkan bahwa masyarakat di daerah tersebut yang masih belum begitu paham mengenai proses pemilihan termasuk pemaknaan masyarakat tentang proses politik itu

⁶² Wawancara dengan subaedah dg intang (Masyarakat) tgl 26 Februari 2016 di desa Kampala

sendiri yang telah berlangsung lama di wilayah setempat, salah satu contohnya adalah pelaksanaan ritus kebudayaan dalam menentukan pemimpin. Dalam hal ini sesuai dengan dinamika kekinian, dibutuhkan peran dari aparaturnya Negara, tokoh masyarakat ataupun pemerhati kearifan lokal yang memiliki kontribusi dalam pembangunan, pemberian pendidikan politik kepada masyarakat agar masyarakat paham bagaimana berdemokrasi sebagai sistem politik kekinian yang baik dan sadar akan hak-hak nya.

Berbicara tentang suatu konsepsi pemilihan kepala desa, di desa Kampala masyarakat merasa tidak punya pilihan lain untuk dipilihnya selain harus ikut kepada perintah patron selaku tuan tanah di desa tersebut.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu informan, yang mengatakan bahwa :

“ Di desa ini politik merupakan hanya sekedar pemilihan semata tanpa melihat figure dan background kandidat tersebut, karena masyarakat sudah punya kontrak jasa dengan keluarga patron, jadi walaupun ada calon lain yang masyarakat belum kenal, siapapun itu saya yakin masyarakat tidak akan memilihnya, karena takut resiko yang akan dihadapi nanti.”⁶³

Politik lokal di desa ini masih sangatlah arif dimana masih dikuasa oleh satu individu yang dikatakan sebagai karaeng sebagai tuan tanah , dimana ditengah budaya-budaya politik diluar yang kian keras, di mulai dari persaingan figur sampai kepada persaingan uang.

3. Faktor kurangnya figur / tokoh baru dalam masyarakat

Eksistensi tokoh masyarakat sebagai perwujudan dari masyarakat itu sendiri sebagaimana halnya penelitian yang telah lakukan di desa Kampala

⁶³ Wawancara dengan Samsiah dg baji (masyarakat) tgl 29 Februari di kediaman beliau.

bahwa identifikasi struktur sosial dan kekuatan politik dari latar belakang kalangan tertentu bahkan kepercayaan dahulu yang begitu kuat dalam beberapa periode waktu tertentu, tidak menjamin adanya suatu kekuatan yang menggerakkan masyarakat apalagi mempengaruhi perilaku memilih masyarakat. Terkadang eksistensi tokoh masyarakatlah yang menentukan kemana pilihan masyarakat diarahkan.

Hubungan antara tokoh masyarakat dengan masyarakat yakni hubungan antara tokoh masyarakat yang memiliki sumber kekuasaan dan kekuasaan aktual dengan masyarakat yang dikuasai. Ini juga sangat relevan dari apa yang dikemukakan oleh Weber terkait dengan kekuasaan dalam pemerintahan desa, dimana kekuasaan tradisional yang bersumber pada tradisi masyarakat dimana status dan hak para pemimpin juga sangat ditentukan oleh adat kebiasaan yang masih bersifat tradisional. Pada konteks kehidupan politik lokal di desa Kampala, pembentukan dan lahirnya seorang yang memiliki pengaruh dan kekuatan politik masih pada gelar kebangsawanan dan kearifan yang dimilikinya. Seperti halnya dalam artian yang lebih luas, yakni wewenang seorang tokoh yang memiliki pengaruh dan kekuasaan adalah kekuatan yang ada pada seseorang atau kelompok orang, yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Legitimasi yang diberikan oleh masyarakat kepada figur idolanya, biasanya menjadi barometer kekuasaan sang elit. Dari hal tersebut mengindikasikan bahwa perubahan dan persegeran nilai sosial menjadi awal gambaran

kehidupan politik kekinian yang diikuti oleh dinamika kehidupan masyarakat baik dalam ranah sosial keseharian serta pada konteks suksesi politik.

“Dalam beberapa periode pemilihan kepala desa di desa Kampala belakangan ini, keluarga patron yang merupakan tuan tanah masih mendominasi politik lokal di desa ini, masyarakat mengikut kepada keluarga patron, ada banyak resiko apabila ada warga yang akan melawan beliau, masyarakat yang sebagian besar tinggal diatas tanah beliau sangat seggan, bukan cuman pemilihan desa atau pemilihan lainnya warga ikut kepada beliau, namun juga apabila ada hajatan di rumah beliau kami warga akan membantu jalannya hajatan tersebut”.⁶⁴

Dari hasil wawancara diatas tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan dari sang elit sangat di patuhi oleh sebagian masyarakat di desa Kampala, bukan hanya di ranah politik namun hingga ke ranah lainnya.

Legitimasi terhadap figur tokoh masyarakat tentunya tidak bisa lepas dari suatu pemahaman bahwa dominasi etnisitas yang dewasa ini muncul sebagai kekuatan politik mampu mendongkrak suatu bangunan politik didaerahnya. Suatu kekuatan yang bersifat sakralistik yang mengiringi arus demokratisasi di tingkat lokal. Perilaku memilih tokoh masyarakat cenderung diarahkan oleh kuatnya ikatan subjektif-psikologis yang syarat dengan primordialisme radikal. Dengan kata lain, bahwa kuatnya ikatan yang membentuk perilaku masyarakat yang dapat melegitimasi suatu rejim atau sistem politik tersebut.

Unsur-unsur yang sangat menentukan dalam proses penanaman atau pewarisan nilai-nilai itu adalah orang tua, saudara, teman sepergaulan, guru, organisasi dan pemimpin masyarakat, Proses menanamkan rasa-terikat

⁶⁴ Wawancara dengan Saleh dg Tawan (tokoh masyarakat) tg: 26 Februari 2016 di rumah beliau.

(attachment) pada diri anggota masyarakat ini kemudian menjadi berakar sangat kuat berhubungan erat dengan gambaran kontestasi pemilihan politik saat ini di desa Kampala. Secara empiris terbukti bahwa dalam sistem politik yang dapat bertahan hidup paling lama, pasti terdapat dukungan yang ditumbuhkan dan dipelihara oleh keyakinan yang mendalam.

“Keluarga Patron merupakan tokoh yang paling disegani di desa kampala ini, masyarakat kemudian tidak terlalu tertarik kepada suatu pertarungan politik di desa ini karena pertimbangan banyak resiko, masyarakat hanya kemudian mensukseskan jalannya pemilihan dan menganggapnya suatu hal yang biasa.”⁶⁵

Kecenderungan perilaku yang melatar belakangi perilaku memilih tokoh masyarakat ini termanifestasi dalam bentuknya yang konkrit, yakni pola berpikir serta tindakan masyarakat yang cenderung melihat cara pandang figur idolanya adalah cara pandang yang harus diikuti seluruh masyarakat secara kolektif. Adanya suatu Kecenderungan perilaku yang bersifat umum (general will), dan terkonstruksi secara sistematis dan mengakar dan merupakan hal yang wajar.

Beberapa pula faktor yang membuat berkembangnya hubungan patron-klien umumnya di Desa Kampala selama beberapa tahun didukung juga oleh beberapa hal, yaitu :

1. Adanya pelapisan kedudukan;
2. Adanya pelapisan kekuasaan;
3. Adanya pelapisan kekayaan yang semuanya dianggap sah oleh masyarakat di sana;

⁶⁵ Wawancara dengan Sirajuddin (masyarakat) tgl 28 Februari 2016 di kediaman beliau.

4. Adanya ketidakamanan sosial yang membuat orang-orang di sana terdorong untuk mencari perlindungan kepada orang yang lebih kuat.

Selain itu hubungan kekerabatan juga mempengaruhi berkembangnya patron-klien di desa Kampala, yaitu dengan adanya hubungan kekerabatan yang bilateral, maka akan terjadi hubungan yang saling membutuhkan yang dapat membentuk patron klien. Munculnya patron klien disini menggunakan pendekatan yang pertama dalam analisis hubungan patron-klien, yaitu hubungan yang terjadi karena adanya kesamaan kebutuhan atau rasa saling membutuhkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan patron-klien dapat berkembang di desa Kampala, karena didukung oleh beberapa faktor, yaitu pertukaran jasa atas kebutuhan primer oleh masyarakat, dimana masyarakat diberikan tempat tinggal oleh patron sedangkan balasan jasanya yakni masyarakat harus mengikut kepada aturan dan perintah dari patron (tuan tanah).

Dari berbagai penjelasan sebelumnya terkait gambaran umum, kehidupan politik lokal khususnya di desa Kampala kabupaten Jeneponto pada konteks pemilihan kepala desa telah jelas bahwa pemegang otoritas terkuat diwilayah ini yakni seorang elit yang merupakan tuan tanah di desa tersebut.

Seorang karaeng yang menjadi patron sangat berpengaruh penting dalam setiap pesta demokrasi mulai dari pemilihan presiden sampai pada konteks pemilihan kepala desa, beliau sangat disegani ditengah masyarakat desa Kampala, penulis melihat bahwa ikatan patron klien antara tuan tanah

dan masyarakat masih sangat harmonis ditengah dinamika politik saat ini, dimana bukan melihat kepada sosok figure atau uang tapi lebih kepada pertukaran jasa yang akan tetap menjadi warisan kelak kepada generasinya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto mengenai skripsi yang berjudul “Hubungan Patron Klien Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 Di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto”, maka ditarik kesimpulan yang berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hubungan Patron Klien dalam pemilihan kepala desa dinilai sangat berpengaruh kuat dalam memenangkan kandidat tertentu, dikarenakan adanya pola hubungan yang terjalin selama ini antara Tuan Tanah (patron) dengan Masyarakat (klien) yang menempati tanahnya tersebut seperti :
 - a) Hubungan Jasa (Balas Jasa) yakni adanya hubungan timbal balik antara Tuan tanah (patron) dan Masyarakat (klien) yang menempati tanah tersebut. Tuan tanah selaku patron menyediakan tempat atau lahan yang kemudian dikelola oleh masyarakat di desa tersebut kemudian secara tidak langsung menjadikan hubungan ini terikat. Masyarakat selaku pengelola tanah yang menempati tanah tersebut merasa berhutang budi kepada Karaeng, karaeng yang dimaksud disini gelaran bangsawan dari sang tuan tanah yang menjadi patron di desa tersebut.
 - b.) Hubungan Politik yakni dimana hak Politik masyarakat yang menempati tanah sang pemilik tanah (patron) seluruhnya mereka serahkan kepada tuan tanah (patron) untuk menentukan siapa yang bakalan dia pilih, masyarakat (klien) tinggal datang untuk mencoblos kandidat utusan dari sang tuan tanah (patron).
 - c). Hubungan Ekonomi, yakni Masyarakat (patron) yang menempati tanah dari Karaeng (patron) diberikan kewenangan untuk mengolah lahan pertanian sebagai salah satu penghasilan dari masyarakat namun kemudian sebagian dari hasil cocok tanam ini diberikan sebagian kepada Karaeng (patron).

- d). Hubungan Komando, yakni hubungan yang bersifat vertikal dimana Tuan tanah (patron) selaku atasan dan Masyarakat (patron) yang menempati tanahnya tersebut adalah bawahan. dimana yang menjadi pemegang komando di desa Kampala adalah seorang tuan tanah (patron) atau yang mereka sebut dengan gelaran karaeng. Masyarakat (klien) yang diberikan tempat untuk bermukim diatas tanah karaeng (patron) harus patuh kepada setiap instruksi atau perintah dari sang karaeng (patron) dari berbagai pegelaran atau suatu hajatan baik bersifat umum maupun pribadi. Bahkan ketika karaeng (patron) menggelar pesta atau hajatan pernikahan atau lainnya maka masyarakat diminta untuk membantu kebutuhan dari acaranya tersebut baik berupa perlengkapan maupun kepada kelangsungan acara tersebut
2. Faktor yang kemudian membuat hubungan patron klien ini erat karena,
- a) Faktor kebutuhan primer yang ingin dipenuhi oleh masyarakat dimana Masyarakat membutuhkan tempat tinggal sedangkan patron selaku tuan tanah di desa tersebut memberikan itu kepada masyarakat. Bagi pandangan yang bersifat materialistis ini, gagasan dan nilai merupakan pencerminan dari kepentingan saja.
 - b) Faktor kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pendidikan politik dimana Pemahaman masyarakat akan pendidikan politik yang masih rendah, atau dengan kata lain perkembangan dan perbedaan situasi yang ada tidak diikuti oleh pola transformasi pengetahuan yang dibutuhkan contohnya pendidikan politik guna menselaraskan dinamika tersebut, di desa Kampala masih sangat kental watak dasar politik patrimonial yang tetap berlangsung. Penguasa lokal yang menjadi patron memerankan diri sebagai raja bagi komunitas yang dipimpinnya dengan imbalan tanah tempat bermukim warga. Berbicara tentang suatu konsepsi pemilihan kepala desa, di desa Kampala masyarakat merasa tidak punya pilihan lain untuk dipilihnya selain harus ikut kepada perintah patron selaku tuan tanah di desa tersebut.
 - c) Faktor kurangnya figure/tokoh baru dalam masyarakat, dimana legitimasi terhadap figur tokoh masyarakat tentunya tidak bisa lepas dari suatu pemahaman bahwa dominasi etnisitas yang dewasa ini muncul sebagai kekuatan politik si patron mampu mendongkrak suatu bangunan politik didaerahnya. Suatu kekuatan yang bersifat sakralistik yang mengiringi arus demokratisasi di tingkat lokal, kecenderungan perilaku yang dilatar belakangi perilaku memilih tokoh masyarakat ini

termanifestasi dalam bentuknya yang konkrit, yakni pola berpikir serta tindakan masyarakat yang cenderung melihat cara pandang figur idolanya adalah cara pandang yang harus diikuti seluruh masyarakat secara kolektif. Dominasi yang dimiliki Karaeng sebagai Patron masih dianggap figure yang kuat.

B. Saran

1. Pendidikan politik yang berkelanjutan utamanya dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik dari jajaran pemerintahan, tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya guna menciptakan proses politik lokal sesuai dengan muara sistem politik demokrasi yang ideal. Pemilihan kepada desa merupakan momentum politik penting guna melaksanakan pembangunan nasional dari aras bawah. Sudah menjadi hal yang seharusnya menjadi pembelajaran dan pengembangan dilakukan secara terus menerus mencari formulasi terbaik untuk membangun sistem politik yang terbaik demi kepentingan masyarakat banyak.
2. Nilai-nilai sosial bersifat luhur yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu, menurut penulis sebagian besarnya mampu dijadikan sebagai perihal yang kontributif membangun kehidupan berdemokrasi, seperti salah satu contohnya adalah tentang nilai dan etika kepemimpinan, bagaimana seorang pemimpin harus menjadi teladan kepada rakyatnya dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahannya

Ahimsa, Heddy Shri, 2007. *Patron & Klien Di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta : Kepel Pres

Budiardjo, Miriam, 2010, *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Budiono, Bambang. 2000. *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan Di Indonesia*. Jogjakarta: Rnika.

Bungin, Burhan, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, 2013, *Jeneponto Dalam Angka*

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, 2013, *Kecamatan Arungkeke Dalam Angka*

Dahlan, Ahmad. 2000. *Pemerintahan Baru Di Indonesia dalam Perspektif Undangundang Nomor 22 Tahun 1999*. Jakarta: Obor Mas.

Hidayat, Imam, 2009, *Teori-Teori Politik*, (Malang: SETARA press).

Idris, Muh irfan dan M, si, Nila Sastrawati. 2012, *Sosiologi Politik*. (Makassar: Alauddin Press).

Maran, Rafael Raga, 2001 *Pengantar Sosiologi Politik* (jakarta : Rieneka Cipta)

Muarif, Oentoeng. 2000. *Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teracuni*. Jogjakarta: Mandala.

Ng. Philipus & Nurul Aini, 2011, *Sosiologi dan Politik* cetakan ke-4, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Ngabiyanto dkk. 2006. *Bunga Rampai Politik dan Hukum*. Semarang: Rumah ndonesia.

Keller, Suzanne .1995, *Penguasa dan Kelompok Elit*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

Pelras, Christian. 1971. *Hubungan Patron-Klien Dalam Masyarakat Bugis Makassar*, Paris: Tidak Diterbitkan

Scoot, James C, 1983, *Moral Ekonomi Petani*, (Jakarta: LP3S)

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Surbakti, Ramlan i, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, PT Grasindo

Usman, Suyanto. 2004 *Sosiologi; Sejarah, Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Center for Indonesian Research and Development (CIReD).

Undang Undang Dasar, Pasal 53 PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

Varma, SP, 2001, *Teori Politik Modern*. Raja Grafindo, Jakarta

Zainuddin, Andi S. 2011. *Tiga Ungkapan Sejarah Turatea*. Makassar: Cv. Bila Utara

Zainuddin, Andi Suwaib. 2015. *Sejarah Turatea*. Makassar: Yayasan Karya Lontara Makassar Sulawesi Selatan Turatea Kabupaten Jeneponto

RIWAYAT HIDUP PENULIS



FADLI ICHSAN, Dilahirkan di Kabupaten Jeneponto pada tanggal 26 Mei 1994. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara yang merupakan buah dari pasangan H. Ichsan Djamal (almarhum) dan Hj. Nurlina Radja.

Penulis memulai pendidikan pada tahun 1999 di SDI Agang Je'ne dan menimba ilmu selama enam tahun dan lulus pada tahun 2005.

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SLTP Negeri 1 Binamu dan lulus pada tahun 2008. Setelah selesai penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Jeneponto dan akhirnya selesai pada tahun 2011.

Setelah berhasil menyelesaikan pendidikan di SMK Negeri 1 Jeneponto pada tahun yang sama penulis kemudian memilih melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi negeri yang ada di kota Makassar yakni Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, penulis mengambil program strata satu di Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Jurusan Ilmu Politik pada prodi Ilmu Politik dan selesai pada tahun 2016 dengan judul karya tulis ilmiah (skripsi) **“Hubungan Patron Klien Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 Di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto”**.

Penulis sangat bersyukur telah diberikan kesempatan menimba ilmu pada perguruan tinggi negeri tersebut sebagai bekal penulis untuk menghadapi tuntutan zaman yang

semakin bergerak maju, hal ini pula yang kemudian melatar belakangi penulis untuk dapat bersosial di lingkungannya dengan turut andil didalam beberapa komunitas-komunitas di masyarakat seperti diantaranya : Sekretaris Adat Komunitas Pemuda Pencinta Seni Turatea dengan masa bakti 2015-2017. Sekretaris Umum Jeneponto Yamaha Matic Club dengan masa bakti 2016-2018

